

**KLAUSULA BAKU LAYANAN JASA PARKIR TINJAUAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
AKAD SYARIAH
(Studi di Paguyuban Jasa Parkir Kota Malang)**

SKRIPSI

**Oleh :
SUMMIYATI
NIM 13220228**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

**KLAUSULA BAKU LAYANAN JASA PARKIR TINJAUAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
AKAD SYARIAH
(Studi di Paguyuban Jasa Parkir Kota Malang)**

SKRIPSI

**Oleh :
SUMMIYATI
NIM 13220228**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran rasa bertanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Klausula Baku Layanan Jasa Parkir Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Akad Syariah (Studi di Paguyuban Jasa Parkir Kota Malang)

Benar-benar merupakan suatu karya ilmiah yang disusun sendiri bukan hasil dari duplikat dengan memindahkan data secara keseluruhan maupun sebagian dari orang lain, kecuali disebutkan referensi secara benar. Jika dikemudian hari terdapat bukti yang ditemukan bahwa disusun orang lain, terdapat penjiplakan, duplikat seluruh maupun sebagian data milik orang lain, maka skripsi dan gelar sarjana saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 November 2017
Penulis,



SUMMIYATI

Nim 13220228

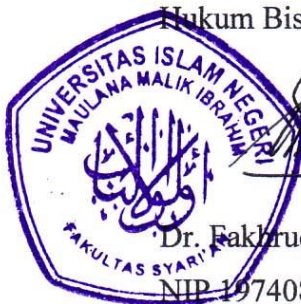
HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Summiyati NIM: 13220228
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KLAUSULA BAKU LAYANAN JASA PARKIR TINJAUAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN AKAD
SYARIAH
(Studi di Paguyuban Jasa Parkir Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 19740819 200003 1 002

Malang, 11 September 2017

Dosen Pembimbing,



Dr. Suwandi, MH
NIP 197606082009012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SKBAN-PT Depdiknas Nomor: 157/BAN-PT/Ak-
XVI/S/VII/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah) Terakreditasi "B" SKBAN-PT Nomor: 021/BAN-PT/Ak-
XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah) Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telp: (0341) 559399, Faksimile: (0341) 559399 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Summiyati
NIM : 13220228
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, MH
Judul Skripsi : Klausula Baku Layanan Jasa Parkir Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Akad Syariah (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Malang)

No.	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 15 Desember 2016	Proposal Skripsi	
2	Selasa, 27 Desember 2016	Revisi Proposal Skripsi	
3	Rabu, 4 Januari 2017	BAB I	
4	Selasa, 21 Februari 2017	Revisi BAB I	
5	Kamis, 2 Maret 2017	BAB II dan III	
6	Senin, 20 Maret 2017	Revisi Bab II dan III	
7	Kamis, 20 April 2017	Bab IV dan V	
8	Selasa, 7 September	Revisi Bab IV dan V	
9	Rabu, 12 September 2017	Abstrak	
10	Rabu, 12 September 2017	ACC BAB I, II, III, IV dan V	

Malang, 12 September 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin M. HI

NIP. 197408192000031002



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Summiyati, Nim 13220228, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

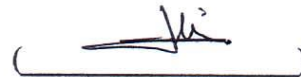
**KLAUSULA BAKU LAYANAN JASA PARKIR TINJAUAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN AKAD
SYARIAH
(Studi di Paguyuban Jasa Parkir Kota Malang)**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai A (sangat memuaskan)

Pada tanggal 27 September 2017 , dengan penguji:

1. Dr. Suwandi M,H.

NIP 19760608200901 2 007



Penguji I

2. Dr. Khoirul Hidayah, SH.M.H.

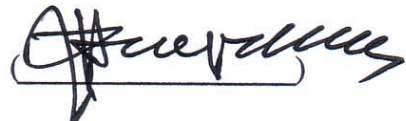
NIP 19780524200912 2 003



Penguji II

3. Dr. Mohamad Nur Yasin, SH. M.Ag

NIP 19691024 199503 1 003



Penguji III

Malang, 24 Oktober 2017

Dekan,



Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum.
NIP. 19651205 200003 1 001

HALAMAN MOTTO

لَمْ تُمْ وَقَدْ تَوَكَّيْدِهَا بَعْدَ الْإِيمَانِ تَنْقُضُوا وَلَا عَهْدَ تُمْ إِذَا اللَّهُ بِعَهْدٍ وَأَوْفُوا
قَضَتْ كَأَلَّتِي تَكُونُوا وَلَا ﴿٩١﴾ تَفْعَلُونَ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ إِنَّ كَفِيلًا عَلَيْكُمْ اللَّهُ جَعَلَهُ
تَكُونَ أَنْ بَيْنَكُمْ دَخَلَ أَيْمَنَكُمْ تَتَّخِذُونَ أَنْكَثَ قُوَّةٍ بَعْدَ مِنْ غَزَلَهَا
بِهِ كُنْتُمْ مَا الْقِيَمَةِ يَوْمَ لَكُمْ وَلِيَبَيِّنَ بِهِ اللَّهُ يُبْلُوَكُمْ إِنَّمَا أُمَّةٌ مِنْ أَرْبَى هِيَ أُمَّةٌ
تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

Artinya:

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (16:91). Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. (16: 92)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang di-gunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	tidak dilambangkan	ض	DI
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	‘(koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ی	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya meng-ikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a)panjang =â	Misalnya لاق	menjadi qâla
Vokal (i)panjang =î	Misalnya ليق	menjadi qîla
Vokal (u)panjang = û	misalnya نود	menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya ’nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ’nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong(aw)= و	Misalnya لوق	Menjadi qawlun
Diftong (ay) = يـ	Misalnya ريخ	Menajdi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya قسردملل ةلاسرلا menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya قمرح فف Menjadi âh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ﻻ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepo-tisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalat”.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang lagi Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang kepada setiap hamba-hambanya yang telah memberikan rahmat ,taufik, hidayah dan inayah-Nya kita. Alhamdulillah kami panjatkan karena telah memberikan nikmat yang tiada tara kepada kami yang khususnya bagi penulis sehingga dapat menyusun serta menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Klausula Baku Layanan Jasa Parkir Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Akad Syariah (Studi di Paguyuban Jasa Parkir Kota Malang)”***, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhamah SAW atas segala bentuk kejayaan Islam yang beliau salurkan kepada seluruh umat Islam di duniaini, serta tak lupa kepada keluarga , sahabat dan para pengikut-Nya yang selalu setia dan meneruskan perjuangan hingga akhir zaman.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lah luput dari para orang-orang hebat yang selalu ada di belakang yang selalu setia menyemangati agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd Haris, M.Ag., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Suwandi, M.Hi , Dr. Fakhruddin, M.Hi, Dr. H. Badruddin, M, Hi, selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin,M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah dan Dr. Burhanuddin Susanto, SHI.M.Hum, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Bisnis Syariah.
5. Dr.Suwandi, MHselaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk berkonsultasi, membimbing serta mengarahkan penulisan skripsi ini sampai selesai, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

6. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah sabar membimbing, memberikan ilmu, serta memberikan pengalaman yang sangat berarti sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dan bekal bagi penulis..
7. Seluruh Staf Akademik Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua (Ibu dan Ayah) yang selalu sabar mendoakan yang terbaik dan membimbing dalam kelancaran mengerjakan skripsi ini dan selalu menyemangati untuk kesuksesan saya dan saudara perempuan sayayang selalu memotivasi untuk tidak berputus asa.
9. Nur Adila, faurina Firda Devi, baiq Herlina, Amir Hasan, Farhatul Layli, dan teman-teman kontrakan seperjuangan yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu disini yang sudah membantu memberikan masukan atas hal-hal mengenai skripsi.
10. Dan Seluruh Teman-teman HBS'13 yang selama ini telah memberikan semangat belajar, mengerjakan tugas bahkan dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 13 September 2017
Penulis

Summiyati
Nim 1322228

ABSTRAK

Summiyati,13220228, *Klausula Baku Layanan Jasa Parkir Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Akad Syariah (Studi di Paguyuban Jasa Parkir Kota Malang)*. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dr.Suwandi, MH

Kata kunci: *Klausula Baku, Jasa Parkir, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Akad syariah, Dinas Perhubungan Kota Malang.*

Di dalam Layanan Jasa Parkir telah menerapkan klausula baku yang mengandung Klausula Eksonerasi atau pengalihan tanggung jawab, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 1999 melarang bagi pelaku usaha menerapkan klausula tersebut, dan didalam islam juga diterangkan bahwa akad atau perjanjian harus jujur, adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap klausula baku “Kerusakan dan kehilangan adalah Tanggung Jawab Pemilik Kendaraan” dalam Layanan Jasa Parkir di Kota Malang? 2) Bagaimana Tinjauan Akad Syariah Terhadap Klausula baku “Kerusakan dan kehilangan adalah tanggungjawab pemilik kendaraan” dalam Layanan Jasa Parkir di Kota Malang?

Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian hukum empiris yang meneliti fenomena hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data primer melalui wawancara langsung. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data kualitatif. Metode pengolahan data dengan melakukan upaya berikut; *editing*, *clasifiying*, *verifiying*, dan analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa klausula baku yang diterapkan dalam Layanan Jasa Parkir yang berbunyi “Kerusakan dan Kehilangan adalah tanggungjawab pemilik kendaraan” tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 no 1(a), 2 dan 3 bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan dan merumuskan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab dan dalam Akad Syariah Klausula baku tersebut tidak sesuai dengan asas-asas Akad Syariah.

ABSTRACT

Summiyati,13220228, Parking Services Raw Clause review the consumer protection legislation and the Shariah Contract (studies in the Department of transportation of Malang). Thesis Department Of Business Law, Faculty Of Islamic Sharia. State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Was Unfortunate.

Supervisor: Dr. Suwandi, MH

Keywords: Raw Clause, Parking Services, consumer protection law, Sharia, Office of transportation Contract of Malang.

Inside Parking Services have implemented raw clause containing Clause E ksonerasi/pengalihan responsibility, in the Consumer Protection Act No. 8 1999 banning for businessmen to apply the clause, and in isla also explained that the contract/agreement must be truthful, fair and not detrimental to either party.

This research there is a formulation of the problem, namely: 1) how to Review the consumer protection laws Against the raw clause "damage and loss is the responsibility of the owner of the vehicles" in Service of parking in the city of Malang? 2) How the review of contract Clause Against Islamic raw "damage and kehilangan adalah the responsibility of the vehicle owner" in the parking Services in the city of Malang?

The study classified into the types of empirical legal research that examines the phenomenon of law. The approach used is the juridical sociological approach. The method of primary data collection through a live interview. Methods of data analysis used in the study is the analysis of qualitative data. Method of processing data by performing the following attempts; editing, clasifiying, verifying, and data analysis.

The results of this research show that the raw clause applied in Parking Services that read "damage and loss is the responsibility of the vehicle owner" is not sesuia with the consumer protection act Article 18 no 1 (a), 2 and 3 that dilaraang trade lists and formulate raw clause which States the transfer of responsibilities and in Akkadian the raw Clause Sharia is incompatible with the principles of Islamic marriage contract.

مستخلص البحث

فورنا فيردا ديفى أ، ١٣٢٢٠١٦٢، تنفيذ عقد المساهمة في التأمين الحياة في الشركة التكافل الاسرة والشركة التأمين الحياة الشريعة بومي فوترا (الدراسات المقارنة في الشركة التكافل العائلي RO خليفة أكينجي والشركة التأمين الحياة الشريعة بومي فوترا مدينة مالانج). البحث الجامعي، قسم الاقتصادية الشريعة، كلية الشريعة جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة: عفة نشيعة، الماجستير

الكلمات الرئيسية: العقد المساهمة، التأمين، التكافل العائلي و التأمين الحياة الشريعة بومي فوترا

المساهمة في التأمين الحياة حيث المساهمة في عقد التبرع الصندوق الذي يستثمر الى الزبائن. ولكن في الشركة التأمين الحياة في المقابل، بينما الشركة التكافل العائلي الصندوق الاستثمار التبرع يدخل إلى الصندوق الاحتياطي التبرع.

هذه الدراسة، هناك صياغة للمشكلة، وهي: (١) كيفية ممارسة عقد المساهمة في التأمين الحياة في الشركة التكافل العائلي RO خليفة أكينجي والشركة التأمين الحياة الشريعة بومي فوترا مدينة مالانج؟ (٢) كيفية مراجعة القانون رقم ٤٠ عام ٢٠١٤ حول التأمين و مجلس الشريعة الوطنية مجلس العلماء اندونيسيا رقم ٥٣ مجلس الشريعة الوطنية مجلس العلماء اندونيسيا رقم III السنة ٢٠٠٦ عن العقد التبرع في تأمين وإعادة التأمين في العقد المساهمة في التأمين الحياة في الشركة التكافل العائلي RO خليفة أكينجي والشركة التأمين الحياة الشريعة بومي فوترا مدينة مالانج.

ويصنف هذا البحث إلى نوع البحث القانونية التجريبية التي تدرس الظاهرة القانون. يستخدم نهج قانوني اجتماعي. أساليب جمع البيانات الأولية من خلال المقابلات المباشرة. طرق تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث هو تحليل البيانات النوعية. طريقة معالجة البيانات عن طريقة التالية: التحرير، التصنيف، التحقق، وتحليل البيانات.

وتشير هذه النتائج إلى أن التخطيط الصندوق أو المساهمة في الشركة التكافل العائلي وفقا لأحكام الفتوى مجلس الشريعة الوطنية مجلس العلماء اندونيسيا والقانون رقم ٤٠ في السنة ٢٠١٤ عن التأمين في المادة ٢١، في الشركة التأمين الحياة الشريعة بومي فوترا لا تتفق مع أحكام الفتوى مجلس الشريعة الوطنية مجلس العلماء اندونيسيا والقانون رقم ٤٠ عام ٢٠١٤ عن التأمين المادة ٢١.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
مستخلص البحث.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Pustaka	17
1. Layanan Jasa Parkir	17
2. Konsep Perjanjian/Kontrak	19
3. Konsep Kontrak Baku	22

4. Konsep Undang-Undang Perlindungan Konsumen	24
5. Konsep Akad Syari'ah	31
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Pengolahan Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Malang	48
1. Sejarah Dinas Perhubungan Kota Malang.....	48
2. Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan	49
3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan.....	50
4. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Malang	52
5. Sasaran Tujuan Dinas Perhubungan Kota Malang	52
B. Praktek Klausula Baku Kerusakan dan Kehilangan Adalah Tanggung Jawab Pemilik Kendaraan Dalam Layanan Jasa Parkir di Kota Malang	52
C. Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Kerusakan dan Kehilangan Adalah Tanggung Jawab Pemilik Kendaraan Dalam Layanan Jasa Parkir di Kota Malang	60
D. Tinjauan Akad Syariah Terhadap Kerusakan dan Kehilangan Adalah Tanggung Jawab Pemilik Kendaraan Dalam Layanan Jasa Parkir di Kota Malang.....	66
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu	16
-----------	----------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Tabel 4.1	Struktur Organisasi	51
-----------	---------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara.
2. UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Karcis Parkir
4. Laporan Jawaban Atas Kuisisioner Manajemen Pengelolaan Parkir Dinas
Perhubungan Kota Malang
5. Surat pernyataan penelitian
6. Hasil Foto Wawancara
7. Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial baik disadari atau tidak akan selalu berhubungan atau saling membutuhkan satu sama lain, yang disebut dengan Muamalah. Hubungan horizontal yang terjadi antara manusia dengan manusia lainnya. Ruang lingkupnya meliputi, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa dan sebagainya. Sebagai contohnya yang sering di temukan dalam kehidupan adalah kegiatan ekonomi yang selalu berhubungan antar manusia dengan manusia lainnya¹. Dewasa ini, berbagai macam jenis usaha semakin berkembang untuk memenuhi suatu kebutuhan yang semakin hari semakin banyak, baik karena suatu pekerjaan maupun hal-hal lain yang bersangkutan. Diantara jenis usaha tersebut adalah usaha layanan jasa parkir yang merupakan suatu jenis usaha untuk memfasilitasi kendaraan umum untuk dapat berhenti disuatu tempat tertentu.

¹Ahmad wardi muslih, *Fiqh Muamalat*(Jakarta:Amzah,2010), h.2

Ensiklopedia mendefinisikan layanan jasa parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya². Dalam praktiknya jenis parkir ini ada 3 yaitu parkir paralel, parkir tegak lurus dan parkir serong, fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, dan badan lain yang diatur oleh aturan perundang-undangan, bahkan penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.

Urgensi parkir selain menjadi fasilitas umum masyarakat dan menjadi faktor utama dalam keamanan, parkir juga dijadikan sebagai lahan bisnis, baik parkir yang sifatnya swasta dan pemerintah. Hal ini sudah menjadi lazimnya bagi masyarakat karena melihat dengan transportasi yang semakin hari semakin berkembang yang menjadi pendorong suatu lembaga atau perusahaan untuk membangun atau membentuk suatu bisnis yaitu layanan jasa parkir.

Kota Malang merupakan salah satu kota yang memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya lahan perdagangan dan sektor industri yang semakin pesat, dengan banyaknya area perdagangan di Kota Malang seperti Mall, ruko, cafe dan pasar otomatis membuat para pembisnis

²Parkir”<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Parkir&action=edit>, diakses pada tanggal 24 januari 2016

semakin menarik untuk menjalankan usaha di wilayah sekitarnya, dengan demikian semakin tinggi pusat perekonomian di Kota Malang semakin banyak transportasi pribadi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga dengan pesatnya transportasi dan perekonomian tersebut menimbulkan lahan parkir semakin banyak, untuk dijadikan sebagai media keamanan dan keselamatan. Dalam ketentuan layanan jasa parkir khususnya pembuatan kontrak haruslah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, supaya hak dan kewajiban antara pelaku usaha pengelola parkir dan konsumen seimbang dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Dinas Perhubungan Kota Malang yang bertempat di Jalan Raden Intan Arjosari Malang, merupakan sebuah lembaga yang berwenang sebagai suatu badan yang bekerja membina dan mengawasi masalah-masalah yang terjadi di jalan raya serta masalah lainnya, seperti transportasi, tugas dan tanggung jawab. Dinas Perhubungan Kota Malang telah diatur dalam Perda Kota Malang no 5 tahun 2004 dan Wali Kota Malang no 55 tahun 2008 tentang uraian tugas pokok fungsi dan Tata kerja Dinas Perhubungan Kota Malang. Selain menjadi Pembina dan pengawas dalam transportasi umum Dinas perhubungan juga bertugas mengawasi ketertiban masalah parkir.

Semakin banyak lahan yang dijadikan bisnis layanan jasa parkir semakin banyak pula persoalan yang ada, dan semakin banyak pula keluhan dari masyarakat yang merasa dirugikan, dalam hal ini pengelola layanan jasa parkir mempunyai kebijakan dan ketentuan sendiri membuat resah konsumen karena mencantumkan klausula yang dimana merugikan konsumen dalam karcis yang mereka buat.

Tidak sedikit pelaku usaha yang menggunakan syarat dan ketentuan (klausula) untuk mempercepat proses kesepakatan dalam perjanjian yang isinya terlebih dahulu atau dibuat oleh pelaku usaha tanpa ada negosiasi kepada konsumen sebagai pengguna layanan jasa parkir. Biasanya klausula yang dicantumkan oleh pelaku usaha berisi hal-hal yang berkenaan dengan kewajiban konsumen saja tanpa mencantumkan hak-hak konsumen. Perbuatan tersebut menunjukkan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, sehingga apabila ada konsumen yang merasa dirugikan dalam layanan jasa parkir tersebut maka konsumen tidak mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha layanan jasa parkir dikarenakan pelaku usaha telah mencantumkan klausula baku yang menyatakan “Kerusakan dan kehilangan adalah Tanggung jawab pemilik kendaraan”, atau ketentuan (klausula) yang lain, yang mempunyai kandungan yang sama yaitu pernyataan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen.

Lazimnya yang sering terjadi saat ini, ketentuan (klausula) yang dibuat oleh pelaku usaha khususnya di layanan Jasa Parkir, biasanya hurufnya berukuran kecil, dan biasanya ketentuan (klausula) ada dibalik formulir atau karcis parkir tersebut, sehingga hal tersebut dapat mengelabui konsumen agar tidak sempat membaca ketentuan dalam karcis yang dibuat oleh pelaku usaha tersebut.

Pemberlakuan standar kontrak merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Namun, agar praktiknya tidak merugikan pihak lain, maka perlu ada hukum yang mengatur penerapannya. Bentuk nyata standar kontrak adalah melalui penawaran. Klausula baku atau eksonerasi (*‘aqad al iz’an*)

kepada konsumen pada saat melakukan transaksi dengan produsen³. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-undang Perlindungan konsumen, pengertian klausula baku adalah:

Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Pencantuman klausula baku tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 1 Tahun 1999.⁴ Yang mengatur hak-hak konsumen serta kewajiban untuk pelaku usaha. Namun, orientasi pelaku usaha adalah bisnis, dan bisnis yang dijalankan itu hanya ditujukan untuk mendapatkan keuntungan bukan kepuasan konsumen. Dalam praktiknya banyak konsumen yang mengalami kerugian, hilangnya helm, barang, bahkan sepeda motor dan lain sebagainya, yang mana hal ini bukan menjadi tanggung jawab pelaku usaha karena telah mencantumkan klausula baku yang sifatnya secara otomatis disetujui oleh konsumen.

Hukum perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Mengingat asas-asas pada perlindungan konsumen tersebut meliputi; manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan serta kepastian hukum.⁵ Oleh karenanya hukum perlindungan konsumen sangatlah

³Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*.h.24

⁴pasal 18 yaitu”(1) pelaku usaha dalam menawarkan barang dan /atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian.

⁵Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*.h 4

berperan penting dalam dunia bisnis, dan pada hakikatnya tujuan perlindungan konsumen untuk mencapai kemaslahatan dari hasil transaksi ekonomi atau bisnis, karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kesadaran dari para pelaku usaha untuk selalu mengedepankan perbuatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan lainnya yang berlaku secara yuridis formal.⁶

Berdasarkan prinsip syariah, perjanjian di dalam Islam disebut dengan akad (al-‘aqd) berarti perjanjian, perikatan dan pemufakatan, yang termaktub di dalam alqur’an yaitu:

حُلِّيْ غَيْرَ عَلَيَّكُمْ يُتْلَى مَا إِلَّا أَلَّا نَعْمِ هِمَّةُ لَكُمْ أَحَلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُواْءَ أَمْنُواْ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 يُرِيدُ مَا تَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمَ وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ م

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.(QS.Al-Maidah:1)⁷

Pada dasarnya yang menjadi suatu kewajiban untuk umat Islam agar memenuhi akad-akad-nya, dalam fiqih Islam akad mempunyai beberapa rukun, syarat serta asas-asas yang menjadi pedoman dan landasan yang digunakan sebagai pedoman supaya perjanjian yang dibuat atau dijalankan sesuai dengan syariat Islam.

Akad dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, suatu akad bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang berlaku, khususnya akad yang dituangkan dalam bentuk tulisan disebut dengan kontrak baku, suatu

⁶Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*.h 6

⁷Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir A-lQur'an ,(Jakarta:Maret,1971)

kontrak dimana hanya dibuat oleh salah satu pihak yaitu pelaku usaha, klausula baku merupakan fenomena baru dalam kehidupan modern, sehingga belum dijumpai pada zaman Rasulullah saw. Namun demikian, dalam hukum islam terdapat sejumlah aturan yang menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan diantara kedua belah pihak. Karena itu klausula ini diperbolehkan, selama dapat mendatangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak.

Untuk mencapai kemaslahatan tersebut, maka dalam hukum islam kontrak selalu diwajibkan para pihak agar mengedepankan kehendak syariat ketika akan merumuskan klausula baku.

Dalam hal ini, peneliti hanya memfokuskan bagaimana klausula baku layanan jasa parkir tersebut dalam pandangan undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) serta bagaimana pandangan hukum Islam khususnya dengan akad syariah yang telah memuat ketentuan akad-akad yang berlaku. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian ini yang berjudul “Klausula Baku Layanan Jasa Parkir Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Akad Syariah”(Studi di Paguyuban Jasa Parkir Kota Malang).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan pada materi proposal selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Undang-Undang perlindungan konsumen terhadap klausula baku dalam layanan jasa parkir di Kota Malang?
2. Bagaimana tinjauan akad syariah terhadap klausula baku dalam layanan jasa parkir di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah sudah yang diajukan di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang perlindungan konsumen terhadap klausula baku dalam layanan jasa parkir di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui tinjauan akad syariah terhadap klausula baku dalam layanan jasa parkir di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini, manfaat utama dari penelitian ini diharapkan tercapai secara teoritis dan empiris:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam masalah klausula baku dan memberikan kontribusi kepada masyarakat umum dan kepada para peneliti selanjutnya untuk menghasilkan penelitian Terbaru.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada lembaga maupun suatu usaha dalam bidang layanan jasa parkir.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “klausula baku layanan jasa parkir tinjauan undang-undang perlindungan konsumen dan akad Syariah”. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian judul proposal ini, maka penulis tegaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

1. Klausula Baku: Dalam hukum perjanjian, istilah klausula Baku disebut juga: “klausula Eksenerasi” dalam UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijelaskan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen⁸
2. Jasa Parkir: Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir disisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.
3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen: Menurut peraturan perundang-undangan, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin

⁸Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* ,(Jakarta: Grasindo,2000),h.120.

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan⁹.

4. Akad syariah: Pertalian Ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh kepada objek perikatan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, penyusun membagi menjadi 5 bab yang terdiri dari sub bab yang saling berhubungan dan disusun sesuai tata urutan dari pembahasan masalah yang ada.

Pada BAB I : Pendahuluan yaitu gambaran umum tentang kegelisahan akademik penulis yang dituangkan dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Temuan dalam penelitian diharapkan memberikan manfaat positif dalam ranah teoritik maupun praktik.

⁹Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*.h 1

Pada BAB II : Selanjutnya adalah untuk memperoleh hasil yang maksimal dan untuk mendapatkan hal yang baru, maka peneliti merumuskan kajian teori sebagai salah satu pembanding dari penelitian ini. Dari kajian teori ini diharapkan akan memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian. kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan yang ada di lapangan yang diteliti. Sehingga teori tersebut bias dijadikan sebagai analisis yang relevan dengan data-data yang dikumpulkan.

Pada BABIII : Metode Penelitian, dalam hal ini suatu penelitian memerlukan cara untuk mengulas dan mengumpulkan data-data yang ada, dengan meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat mengungkap sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional dan terarah tentang bagaimana pekerjaan sebelum, ketika dan sesudah mengumpulkan data sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan masalah yang telah ditetapkan.

Pada BAB IV : Tinjauan Undang-undang perlindungan konsumen dan akad Syariah dalam penerapan klausula baku dalam layanan jasa parkir, bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan pada

bab sebelumnya menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.

Pada BAB V : Meliputi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang layanan jasa parkir adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam skripsi Bilal Endra Saputra, program studi ilmu hukum Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016, yang berjudul “Tanggung jawab hukum pengelola parkir atas hilangnya kendaraan bermotor dilokasi Tempat parkir Pasar Muntilan”, penelitian ini diangkat karena terjadinya kasus kehilangan sepeda motor yang sudah sebanyak 3 kali yang terjadi di pasar Muntilan dan hal ini yang menjadi persoalan mengenai tanggung jawab pengelola jasa parkir yang dijadikan sebagai tempat keselamatan dan keamanan bagi konsumen namun dalam hal ini pihak pengelola jasa parkir mengalihkan tanggung jawabnya dengan mencantumkan klausula baku yang terdapat dalam karcir parkir tersebut yang

berbunyi “Kerusakan dan kehilangan adalah tanggung jawab pemilik kendaraan bukan tanggung jawab pengelola parkir”.¹⁰

Kedua, dalam skripsi, Andi Muh. Rahmat Rivai, Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016 yang berjudul “tanggung jawab parkir terhadap konsumen pengguna jasa parkir”. Membahas tentang tanggung jawab pengelola parkir sebagai layanan jasa parkir yang disesuaikan dengan undang-undang perlindungan konsumen dengan menjaga hak dan kewajiban dari konsumen tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dan meninjau seberapa jauh tanggung jawab pengelola jasa parkir kepada konsumen.¹¹

Ketiga, dalam jurnal penelitian Rachamnto Satuhu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2013, yang berjudul “kendala Dinas Perhubungan dalam mengawasi dan memberi Pembinaan bagi pengelola parkir untuk mencegah penggunaan klausula eksonerasi pada karcis (Studi di Paguyuban Jasa Parkir Kota Malang), dari penelitian ini meninjau bagaimana peran Dinas Perhubungan Kota Malang dalam pembuatan atau penerapan karcis yang sifatnya mengandung klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang sering digunakan dalam layanan jasa parkir. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif

¹⁰Bilal Endra Saputra, yang berjudul “*Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor dilokasi Tempat Parkir Pasar Muntinan*” Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016. di akses pada tanggal 17 Maret 2017

¹¹Andi Muh. Rahmat Rivai, “*Tanggung Jawab Parkir Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir*”, Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, di akses pada tanggal 16 maret 2017

analitis yaitu dengan menggambarkan keadaan-keadaan dari objek yang diteliti kemudian terhadap permasalahan yang timbul ditinjau berdasarkan peraturan yang berlaku. Sehingga didapat kesimpulan terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan juga menjadi pemecahan dari masalah tersebut.¹²

Berdasarkan skripsi yang telah dijabarkan ada kesamaan dan perbedaan yang dibahas dalam penulisannya, adapun kesamaannya adalah dari objek yang dikaji yaitu parkir dengan metode yang sama yaitu yuridis empiris dan beberapa analisis dan referensi yang dipakai. Adapun yang menjadi titik pembeda adalah tinjauan yang dikaji dalam menganalisis objek yang sama tersebut, dalam penelitian penulis tinjauan yang digunakan adalah Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan akad syariah, dengan menggunakan 2 perspektif ini akan menjadi semakin lengkap penjelasannya dari undang-undang secara umum dan konsep Islam yang digunakan sebagai memperkuat dalam menganalisis penulisan tersebut.

¹²Rachamnto Satuhu, “ *Kendala Dinas Perhubungan dalam Mengawasi dan Memberi Pembinaan Bagi Pengelola Parkir untuk Mencegah Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Karcis (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Malang)*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, Malang 2013 di akses pada tanggal 16 Maret 2017

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Andi Muh.Rahmat Rivai, Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar,2016	Tanggung Jawab Parkir Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir	Dalam skripsi ini peneliti menggunakan objek yang sama yaitu parkir dengan metode penelitian yang kualitatif Empiris.	Dalam skripsi ini mengkaji tanggung jawab pengelola jasa parkir terhadap konsumen yang telah disesuaikan oleh peraturan perundang-undangan, serta kelalaian para konsumen dalam melaksanakan peraturan jasa parkir tersebut.
2.	Rachamnto Satuhu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2013	Kendala Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Dan Memberi Pembinaan Bagi Pengelola Parkir Untuk Mencegah Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Karcis (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Kota Malang)	Dalam skripsi ini peneliti menggunakan objek yang sama yaitu parkir dengan metode penelitian yang kualitatif Empiris.	Dalam jurnal skripsi ini mengamati peran dan kerja Dinas Perhubungan Kota Malang dalam penerapan karcis yang digunakan dalam layanan jasa parkir, dimana karcis yang digunakan itu supaya tidak ada unsur klausula eksonerasi dalam kontrak baku, yang disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
3.	Bilal Endra Saputra, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016	Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor Di lokasi Tempat Parkir Pasar Muntilan.	Dalam skripsi ini peneliti menggunakan objek yang sama yaitu parkir dengan metode penelitian yang kualitatif Empiris.	Dalam skripsi ini penulis mengangkat penelitian ini berangkat dari kasus yang ada dengan terjadinya kehilangan atas kelalaian penanggung jawab pengelola parkir dengan pendekatan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

B. Kajian Teori

Untuk menjelaskan pengertian dari Judul penulisan skripsi ini, maka peneliti memberikan penjelasan beberapa istilah saja dalam penulisan skripsi yang berjudul klausula baku layanan jasa parkir tinjauan Undang-undang perlindungan konsumen dan akad syariah. Pembahasan ini berdasarkan teori yang sudah ada yaitu:

1. Layanan Jasa Parkir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.¹³

Adapun Pengelola parkir bukan perusahaan asuransi, melainkan perusahaan jasa yang mengelola lahan perparkiran di suatu area property, dengan cara bekerjasama dengan pemilik lahan area tersebut, sebagian besar kami (vendor) mengelola parkir di suatu pusat perbelanjaan, perkantoran ataupun gedung atau pelataran parkir. Perusahaan ini dibayar atas dasar jumlah transaksi yang dilakukan ataupun berdasarkan persentase pendapatan

¹³https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelola_parkir di akses pada tanggal 10mei 2017

yang diperoleh yang berkisar antara sampai 5 %. Pada awalnya pengelolaan parkir di pinggir jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perusahaan daerah, kemudian mulai berkembang pelataran dan gedung parkir yang juga dikelola oleh pemerintah daerah. Karena pengelola biasanya tidak efisien akhirnya pengelolaan mulai dikerjasamakan dengan perusahaan swasta, seperti yang banyak ditemukan saat ini diberbagai lokasi parkir umum.¹⁴

Ada tiga jenis utama parkir, yang berdasarkan mengatur posisi kendaraan, yaitu parkir paralel, parkir tegak lurus, dan parkir serong.¹⁵

a. Parkir Paralel

Parkir sejajar di mana parkir diatur dalam sebuah baris, dengan bumper depan mobil menghadap salah satu bumper belakang yang berdekatan. Parkir dilakukan sejajar dengan tepi jalan, baik di sisi kiri jalan atau sisi kanan atau kedua sisi bila hal itu memungkinkan. Parkir paralel adalah cara paling umum dilaksanakan untuk parkir mobil di pinggir jalan. Cara ini juga digunakan di pelataran parkir ataupun gedung parkir khususnya untuk mengisi ruang parkir yang parkir serong tidak memungkinkan.

b. Parkir tegak lurus

Dengan cara ini mobil diparkir tegak lurus, berdampingan, menghadap tegak lurus ke lorong atau gang, trotoar, atau dinding. Jenis mobil ini parkir lebih terukur daripada parkir paralel dan karena itu biasanya digunakan di tempat dipelataran parkir-parkir atau gedung parkir.

¹⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelola_parkir di akses pada tanggal 10mei 2017

¹⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelola_parkir di akses pada tanggal 10mei 2017

Sering kali, di tempat parkir mobil menggunakan parkir tegak lurus, dua baris tempat parkir dapat diatur berhadapan depan dengan depan, dengan atau tanpa gang di antara keduanya. Bisa juga parkir tegak lurus dilakukan dipinggir jalan sepanjang jalan di mana parkir ditempatkan cukup lebar untuk kendaraan keluar atau masuk ke ruang parkir

c. Parkir serong

Salah satu cara parkir yang banyak digunakan dipinggir jalan ataupun di pelataran maupun gedung parkir adalah parkir serong yang memudahkan kendaraan masuk ataupun keluar dari ruang parkir. Pada pelataran ataupun gedung parkir yang luas, diperlukan gang yang lebih sempit bila dibandingkan dengan parkir tegak lurus.

2. Konsep Perjanjian atau Kontrak

Menurut Daeng Naja, beliau berpendapat bahwa kontrak adalah perjanjian itu sendiri¹⁶. Subekti mempunyai pendapat yang berbeda mengenai istilah “perjanjian atau persetujuan” dengan kontrak. Menurut Subekti istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Sedangkan sarjana lain, Pothier tidak memberikan pembedaan antara kontrak dan Perjanjian, namun membedakan pengertian kontrak dengan *convention (pacte)*. Disebut lebih menciptakan, menghapuskan (*opheffen*), atau mengubah (*wijzegeen*) perikatan. Sedangkan contract adalah perjanjian yang mengharapakan terlaksananya perikatan.¹⁷

¹⁶Daeng naja, *Contrac Draftng* (Bandung; citra Aditya Bakti , 2006) h. 6

¹⁷Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta; Kencana), 2010. h. 14

Pasal 1313 BW memberikan rumusan tentang “kontrak atau perjanjian” adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁸ Pasal 1313 ayat (1) KUH perdata, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Dengan demikian perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.¹⁹

Adapun Syarat- syarat Kontrak adalah sebagai berikut:

a. Kesepakatan

Syarat subjektif pertama dalam sahnya suatu perjanjian adalah kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, yang dimaksud dengan kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan penipuan atau kekhilafan.

b. Kecakapan

Adapun yang dimaksud dengan kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya,

¹⁸Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*h15

¹⁹R.soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan* (Jakarta;sinar grafika, 2010), h.3

dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut Undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pada dasarnya, setiap orang dapat dikatakan cakap menurut hukum apabila ia telah dewasa,, akil baligh dan sehat pikirannya.²⁰

c. Suatu hal tertentu

Menurut KUH Perdata hal tertentu adalah²¹:

- 1) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata)
- 2) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata)

d. Suatu Sebab Yang Halal/ Kausa halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya, yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUH Perdata)

Unsur-unsur perjanjian itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut²²:

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah unsur yang harus ada dalam perjanjian, tanpa adanya unsur esensialia maka tidak ada perjanjian. Contohnya dalam jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam jual beli, perjanjian

²⁰Sulchan Yasyin, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amanah, 1997) h.85

²¹R.soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan* (Jakarta;Sinar Grafika,2010), h.13

²²Soeroso,*Perjanjian Di Bawah Tanga*, h.16

tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *Naturalia* adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang dengan demikian apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka Undang-undanglah yang mengaturnya, jadi unsur *naturalia* merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam perjanjian.

c. Unsur *Aksidental*

Unsur *aksidental* adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.

3. Konsep Mengenai Kontrak Baku

a. Pengertian Kontrak Baku

Istilah kontrak baku berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *Standart contract* atau *standart agreement*, sedangkan dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*standart contract*” dan “*standart voorwardeee*”.²³ Adapun yang dimaksud dengan kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut adalah tercetak (*boilerpate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informative tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut

²³J.satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*(Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,1993). h.44

tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausulanya yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.²⁴

b. Sejarah Timbulnya Kontrak baku

Gras dan Plato mengemukakan latar belakang lahirnya perjanjian baku. Gras mengatakan bahwa kelahiran perjanjian baku antara lain merupakan akibat dari perubahan susunan masyarakat. Masyarakat sekarang bukan lagi merupakan kumpulan individu seperti pada abad XIX, tetapi merupakan kumpulan dari sejumlah ikatan kerja sama (organisasi), perjanjian baku lazimnya diperbuat oleh organisasi perusahaan-perusahaan. Plato berkata pula sebagai berikut:²⁵

“latar belakang tumbuhnya perjanjian baku adalah keadaan social dan ekonomi. perusahaan yang besar, perusahaan semi pemerintah atau perusahaan- perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka menentukan syarat-syarat tertentu secara sepihak. pihak lawannya (*waderpartiji*) yang pada umumnya mempunyai kedudukan (ekonomi) lemah, baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya hanya menerima apa yang disodorkan itu “

Taryana Sunandar mengatakan bahwa pembuatan perjanjian atau kontrak baku pada awalnya dilakukan oleh perusahaan secara individual, kemudian oleh asosiasi bisnis. pembuatan diprakarsai oleh UNECE (*United Nation Economic Comission for Europa*). Demikian pula berbagai asosiasi perdagangan seperti GFTA (*Grain and Free Trade*

²⁴Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung: PT.citra Aditya Bakti) h. 76

²⁵Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h.148

Association) telah mengembangkan kontrak baku untuk transaksi perdagangan jenis tertentu²⁶.

c. Ciri-ciri kontrak Baku

Dalam praktek klausula-klausula yang berat sebelah dalam kontrak baku menurut Munir Fuady mempunyai wujud sebagai berikut:²⁷

- 1) Dicetak dengan huruf kecil
- 2) Bahasa yang tidak jelas artinya
- 3) Tulisan yang kurang jelas dan susah dibaca
- 4) Kalimat yang kompleks
- 5) Bahkan, ada kontrak baku yang tidak berwujud seperti kontrak (kontrak tersamar) seperti tiket parkir karcis bioskop, tanda penerimaan pembuatan foto dan lain-lain.

4. Konsep Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Istilah “hukum konsumen” dan hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang hukum itu identik.”²⁸ Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, jadi sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

Ada juga yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. AZ. Nasution, misalnya berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau

²⁶Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) h. 173h. 149

²⁷Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung: PT. citra Aditya Bakti) h. 78

²⁸Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika) h. 13

kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.²⁹

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:³⁰ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Adapun hak-hak dasar konsumen yaitu:

- a) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- b) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- c) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d) Hak untuk didengar (*the right to heard*)

Adapun kewajiban konsumen dalam UUPK Pasal 5 yaitu:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³¹

²⁹Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika) h. 13

³⁰Sidartha, , *hukum perlindungan Konsumen Indonesia* ,(Jakarta: Grasindo,2000).h.1

³¹Ahmadi miru& sutarman yodo,*hukum perlindungan konsumen*,(jakarta: Pt.Grasindo Persada,2004).h.38

Disamping hak-hak dalam pasal 4 juga terdapat hak-ha konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak antinomy dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

Pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) sama dengan cukupan produsen yang dikenal di Belanda, karena pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup pelaku usaha luar negeri, karena UUPK membatasi setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.³²

Dalam pasal 6 No.8 Tahun 1999 UUPK hak-hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa diperdagangkan
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hokum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hokum sengketa konsumen;
- d) Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hokum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³³

³²Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran* (Banjarmasin: FH Unlam Press) H. 34

³³Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen &Sertifikasi Halal* (Malang:Uin Maliki Press, 2011) .h. 11

Hak dan Kewajiban dalam kontrak (bisnis) merupakan dua sisi yang bersifat saling timbal balik. Artinya, hak salah satu pihak akan menjadi kewajiban pihak lain, dan begitu pula sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak pihak lain. Karena itu, disamping hak, pelaku usaha mempunyai kewajiban- kewajiban yang telah tercantum dalam pasal 7 UU No.8 Tahun 1999, antara lain:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) memberlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f) member kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) member kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³⁴

Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang atau produksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja

³⁴Pasal 7 UU No.8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*, (Lembaran Negara RI Tahun 1999, Nomor 42)

disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai saat melakukan transaksi dengan produsen.³⁵

a. Klausula Baku dalam Perlindungan Konsumen

Perjanjian yang mengandung klausula baku (eksonersi) telah menjadi bagian dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat. Keberadaan klausula baku dalam perjanjian baku didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1388 ayat 1 KUH Perdata. Hakekat klausula baku dalam perjanjian tidak lain adalah adanya pembagian beban resiko yang sesuai, meskipun dalam praktiknya makna klausula baku sering disalahgunakan oleh mereka yang memiliki dominasi ekonomi yang tidak hanya untuk membebaskan diri dari beban tanggung jawab berlebihan, tetapi juga sampai pada penghapusan tanggung jawab. Karena itu sebagai upaya perlindungan konsumen, perlu adanya pembatasan terhadap penggunaan klausula baku dalam setiap kontrak perjanjian³⁶.

Shidarta membedakan antara klausula baku dengan klausula eksonerasi yaitu dalam klausula baku, yang ditekankan adalah prosedur pembuatannya yang sepihak dan bukan mengenai substansinya, sedangkan dalam klausula eksonerasi, yang dipermasalahkan adalah menyangkut substansinya yaitu mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha.³⁷

³⁵Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) h.44

³⁶Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal* (Malang: Uin Maliki Press, 2011) .hal 25

³⁷Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* .Hal 350

Perlindungan konsumen merupakan salah satu prinsip hukum yang berlaku dalam hubungan antara pihak produsen atau pedagang dengan pihak konsumen. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan eksistensi kontrak baku adalah sebagaimana ditentukan oleh pasal 18 undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa dalam suatu kontrak baku dilarang dengan ancaman batal demi hukum terhadap hal-hal sebagai berikut³⁸:

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan /jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan /atau perjanjian apabila:
 - a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
 - b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
 - c) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - d) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - e) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - f) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - g) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan

³⁸Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007) h 94

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum

- 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.³⁹

Dari ketentuan pasal tersebut, larangan penggunaan klausula baku dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi atau materi dan bentuk tulisannya. Dari segi materinya, pada saat pembuatan klausula baku dilarang memuat ketentuan yang tidak adil, sehingga hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Sedangkan dari segi penulisannya, klausula itu harus dinyatakan secara jelas sehingga dapat dipahami oleh konsumen.⁴⁰

Disamping itu, Undang-undang tersebut juga mewajibkan pelaku untuk mengikuti pelaku untuk mengikuti ketentuan yang berlaku dalam menyusun klausula baku. Apabila dalam kenyataan pelaku usaha menyalahi ketentuan yang berlaku, maka klausula baku dinyatakan batal demi hukum. Artinya, klausula baku yang telah dibuat secara sepihak itu akan dianggap tidak ada karena belum mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*hurriyyah at-Ta'aqud*), larangan tersebut dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha agar tidak mengalami kerugian.⁴¹

³⁹Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁴⁰Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal* (Malang: Uin Maliki Press, 2011) .hal 27

⁴¹Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal* (Malang: Uin Maliki Press, 2011) .hal 27

5. Konsep Akad syariah

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah ⁴²:

أَلْعَقْدُ هُوَ التَّصَرُّفُ الَّذِي يَبْنِي بَيْنَ طَرَفَيْنِ وَتَنْشَأُ عَنْهُ إِلتِزَامَاتٌ تَقُومُ بَيْنَهُمَا.

“aqad yaitu tasarruf antara dua pihak dan timbulnya ikatan-ikatan atau kewajiban-kewajiban yang dipelihara oleh keduanya “. (Yusuf Musa, 1985: 332)

Dalam definisi yang lain dikemukakan:

إِرتِبَا ط إِلَّا يَجَابُ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ رِشْتِ التَّرَا ضَى

*“perikatan ijab kabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak”.*⁴³

Adapun yang dimaksud dengan “yang sesuai dengan kehendak syariat” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’, misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kalimat “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya ialah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).⁴⁴

Adapun Rukun-rukun Akad adalah sebagai berikut:

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-

⁴²Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* .h.43

⁴³Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, h.46

⁴⁴Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, h.19

masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan ijtihad yang diwujudkan oleh akad tersebut. Adapun rukun-rukun akad ialah sebagai berikut⁴⁵:

- a. *'aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri atas satu orang, terkadang terdiri atas beberapa orang misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang terdiri atas beberapa orang. Seseorang berakad, terkadang merupakan orang yang memiliki hak (*aqid ashi*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.
- b. *Ma'qud alaih* benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual akad jual beli, dalam akad *hibah*(pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
- c. *Maudhu 'al'aqad* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada penggantian (*'wadh*). Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti tujuan pokok 'irah adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada penggantinya.

⁴⁵ Abdul Rahman Gazali Dkk, *Fiqh Muamalah* .h 44

- d. *Shigat al'aqad* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

Asas-asas kontrak syariah di bagi menjadi 6 diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Asas Ikhtiyari (Asas sukarela)

Asas ikhtiyari menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kehendak masing-masing pihak, serta harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan pernyataan yang salah. Dasar hukum dalam Al-Qur'an tentang adanya asas sukarela dalam pembuatan perjanjian yaitu:

تَرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَأَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى عَنْ تَجِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu”. (QS.An-nisaa':29)

Bahwa segala perjanjian haruslah mendasarkan pada asas keridhaan. Apabila dalam melaksanakan perjanjian tidak terpenuhinya asas ini, maka sama artinya seperti memakan harta dengan cara yang bathil.

b. *Asas Taswiyah* (Asas Kesetaraan)

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, Allah SWT telah memberikan atau melebihkan sebagian yang dimiliki oleh manusia yaitu dalam hal rezeqi. Allah SWT berfirman dalam QS.An Nahl ayat 71 yaitu:

مَا عَلَىٰ رِزْقِهِمْ لِأَدَىٰ فُضِّلُوا الَّذِينَ فَمَا الرِّزْقِ فِي بَعْضٍ عَلَىٰ بَعْضٍ فَضَّلَ وَاللَّهُ
يَجْحَدُونَ ۚ اللَّهُ أَفَبِنِعْمَةٍ سَوَاءٌ فِيهِ فَهُمْ أَيْمَنُكُمْ مَلَكَتْ

“Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah”.(QS.An Nahl :71)

Asas *taswiyah* ini merupakan asas kesetaraan bagi pelaku usaha dan konsumen, karena diantara pelaku usaha dan konsumen adanya perilaku saling membutuhkan satu dengan yang lain. Adanya asas ini membuat para pihak memiliki yang sama yaitu mempunyai kedudukan yang seimbang dalam menentukan dari suatu perjanjian. Sedangkan yang membedakan hanyalah ketakwaannya.⁴⁶

c. *Asas Itikad Baik*

Dalam perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya bahwa setiap orang yang membuat kontrak harus dilakukan dengan itikad baik. Ada tidaknya itikad baik para pihak bisa diuji dan diketahui dari pelaksanaan perjanjian atau perilaku para pihak dalam melaksanakan kontrak. Bahwa dalam Islam, niat dalam kontrak merupakan prinsip

⁴⁶Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah* h. 43

mendasar karena terkait dengan kepercayaan para pihak sebelum melakukan perbuatan.⁴⁷

d. Asas sebab yang Halal

Asas sebab yang halal pada hakekatnya kehidupan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT.⁴⁸

Adanya asas sebab yang halal ini yaitu, dalam suatu kontrak sah dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam mengadakan suatu perjanjian para pihak tidak hanya melakukan kesepakatan terhadap pihak lainnya, melainkan sebelum memulai perbuatan para pihak harus memiliki niat sebagai bentuk keyakinan.

e. Asas *Hururiyah* (Asas kebebasan Berkontrak)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak dalam membuat suatu perjanjian, bentuk dan isi perjanjian tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila para pihak telah menentukan bentuk dan isi dari perjanjian tersebut maka para pihak secara langsung menyepakati perjanjian tersebut dan harus melakukan hak dan kewajibannya masing-masing.⁴⁹

Pengertian asas kebebasan berkontrak dalam Islam berbeda dengan apa yang dimaksud kebebasan berkontrak dalam hukum konvensional. Perbedaannya bahwa kebebasan yang bersifat terkait dengan syara'. Karena bersifat terikat maka kebebasan berkontrak itu akan dibenarkan selama tidak bertentangan dengan syari'at islam, sehingga perjanjian

⁴⁷Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, h.36

⁴⁸Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah* h. 42

⁴⁹Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 31

tersebut boleh dilaksanakan.⁵⁰ Asas Hururiyah at-Ta'aqud ini juga dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak yang telah ada dalam pasal 1338 KUH Perdata.

f. Asas konsensualisme (ar-ridha'iyah)

Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya dalam mengadakan transaksi. Suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan kabul. Dalam hal ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Selain itu, harus adanya komunikasi antara para pihak yang bertransaksi dan di sini juga diperlukan adanya kerelaan kedua pihak mengenai hal-hal yang diakadkan.⁵¹

Adapun macam-macam akad syariah yang termasuk dalam kontrak syariah salah satunya adalah akad Al-Wadi'ah yang akan dibahas dalam bab ini:

a. Pengertian akad wadi'ah

Barang titipan dikenal dalam bahasa fiqh dengan *al-wadi'ah* menurut bahasa *al-wadi'ah* ialah salah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga (*ma Wadi'a 'inda Ghair Malikihi Layahfadzahu*), berarti bahwa al-wadi'ah ialah memberikan. Makna yang kedua al-wadi'ah dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata, "*awada'tuhu*" artinya aku menerima harta tersebut darinya (*qabiltu Minhu Dzalika al-Mal liyakuna Wadi'ah "indi*). Secara bahasa

⁵⁰Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah* h. 42

⁵¹Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 34

alwadi'ah memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaanya (*I'tha'u al-Mal Liyahfadzahu wafi Qabulihi*).⁵²

Definisi akad penitipan menurut sejumlah ulama pensyarah dalam Mazhab Hanafi adalah pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik disampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun dengan tidak langsung (*dilaalah*), seperti perkataan orang yang menitipkan barangnya kepada orang lain, “saya menitipkan benda ini kepadamu” lalu orang yang dititipi menerimanya. Ini adalah bentuk penitipan secara terang-terangan. Adapun secara dilalah misalnya seseorang mendatangi orang lain dengan membawa pakaiannya dan meletakkannya dihadapannya sembari berkata ”ini adalah titipan padamu” lalu orang yang disertai pakaian itu diam saja, maka dia menjadi orang yang dititipi secara *dilaala*.⁵³

Al-wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, firman Allah SWT:⁵⁴

يُؤَدِّبَعْضَ بَعْضُكُمْ أَمِنْ فَإِنْ مَقْبُوضَةٌ فَرِهَنْ كَاتِبَاتٍ جِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ
فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا وَمَنْ الشَّهَدَةُ تَكْتُمُوا وَلَا رَبُّهُ وَاللَّهُ وَلِيَّتِي أَمْنَتُهُ وَأَوْثَمِنَ الَّذِي فَلَا
عَلَيْكُمْ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ رِءَاثِم

⁵²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Rajawali Pers,2014).H.179

⁵³Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, (Jkarta:Gema Insani:2011), h.556

⁵⁴Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2012).h. 206

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS AL-baqarah:283)

Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja dengan sebagaimana mestinya atau melakukan jinayah terhadap barang titipan. Berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Dar-alQuthni dan riwayat Arar bin Syua'ib dari Bapakny, dari kakeknya bahwa Nabi saw. Bersabda; *”siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin”* (HR. Daruqhutni). ia juga bersabda; *“tidak ada kewajiban menjamin orang yang diberi amanat.”* (HR.Baihaqi).⁵⁵

b. Rukun-rukun akad Wadi'ah

Menurut syafiiyah *al-wadi'ah* memiliki tiga rukun, yaitu:⁵⁶

- a) Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- b) Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berkal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c) Shigat ijab dan qabul *al-wadi'ah*, disyaratkan pada ijab kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

Konsekuensi hukum akad wadia'ah adalah kewajiban orang yang dititipi untuk menjaganya demi pemiliknya. Karena, dari pihak pemilik,

⁵⁵Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, h.207

⁵⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.183

akad wadi'ah adalah permintaan untuk menjaga dan penyerahan sesuatu sebagai amanah. Adapun dari pihak yang dititipi adalah komitmen untuk menjaga, sehingga ia wajib menjaganya.⁵⁷ Menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara harta yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada *atsar* Umar r.a. pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a. ketika barang titipannya yang ada pada Anas r.a. dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas r.a. sendiri masih ada.⁵⁸

⁵⁷Wahbah Zuhaili *Fiqh Islam Waadillatuhu* . h.558

⁵⁸Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah*. h.185

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah Penelitian *Yuridis Empiris* yaitu penelitian yang berusaha mencari data primer yang diperoleh secara langsung dari penerapan Klausula baku dalam layanan Jasa Parkir. Dan untuk mendukung data primer, dibutuhkan juga data dari pustaka yaitu mencari data-data sekunder yang didapat dari menelaah dan mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan-laporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Klausula baku dalam layanan Jasa Parkir.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan *Yuridis Sosiologis*. Pendekatan itu sendiri adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan dengan cara bagaimana dia menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah

metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.⁵⁹

Hukum sebagai gagasan teoritis merupakan suatu norma yang berisikan perintah, larangan, izin dan dispensasi. Jadi norma hukum berbicara tentang apa yang harus dan apa yang tidak harus, atau apa yang akan, apa yang sedang dan yang sudah terjadi. Sedangkan fakta-fakta sosial membicarakan hal-hal yang dihubungkan dengan hukum harus dianggap sebagai faktor deskriptif yang patuh terhadap analisa sebab akibat. Bertolak dari pandangan ini sebagai ahli hukum berpedoman bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam bidang hukum adalah masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisa masalah-masalah hukum.⁶⁰ Pendekatan yuridis sosiologis terhadap hukum dapat dilakukan dengan cara memahami kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial secara spontan terhadap pelanggaran hukum formal tertentu.⁶¹

C. Lokasi Penelitian

Objek penelitian tentang Klausula baku dalam layanan Jasa Parkir di Paguyuban Jasa Parkir Kota Malang dan Dinas Perhubungan Kota Malang.

⁵⁹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta:Rajawali Pers, 2001), h.13-14.

⁶⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) h.112.

⁶¹Bahder Johan Nasution., *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung:Mandar Maju, 2008), h. 130.

D. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber di lokasi penelitian berkaitan yakni, Klausula baku dalam layanan Jasa Parkir. Dalam studi lapangan ini dapat diperoleh data atau keterangan secara langsung dengan wawancara dari layanan jasa yang terkait yaitu, Paguyuban Perparkiran Kota Malang dengan Bapak Nanang selaku kepala koordinator pengelolaan jasa Parkir Kota Malang dan instansi yang terkait yaitu, Dinas Perhubungan Kota Malang dengan Bapak Hary Dwi Yudianto, SPsi,MM, selaku kepala seksi perencanaan dan Tata kelola Perparkiran.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁶² Yang kaitannya dengan klausula baku dalam layanan jasa Parkir di Paguyuban dan Jasa Parkir dan Dinas Perhubungan Kota Malang, peneliti mendapatkan laporan atas kuisioner manajemen pengelolaan Perparkiran Kota Malang, karcis parkir, dan data-data pengelolaan jasa parkir.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian. Metode dan pendekatan tersebut antara lain:

⁶²Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2004), h. 30.

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara menghimpun keterangan yang dilakukan dengan Tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan muka dan dengan arah dan tujuan yang telah ditentukan. Adapun macam-macam wawancara ada dua yaitu wawancara terstruktur dan tak terstruktur. wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, pokok-pokok yang dijadikan dasar pertanyaan diatur secara sangat terstruktur. Sedangkan wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang berbeda dengan terstruktur. Cirinya kurang diintrupsi dan arbiter. Pertanyaan biasanya tidak disusun terlebih dahulu, malah disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik responden. Dalam proses wawancara demikian kadang-kadang terjadi terwawancara atau pewawancara sudah mengajari semua yang ada dibenaknya dan apa yang diketahuinya kepada lawan bicaranya.⁶³ Disini peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Dalam hal ini pewawancara dapat menanyakan semuanya yang berkaitan dengan klausula baku layanan jasa Parkir di Paguyuban jasa Parkir Kota Malang dengan Bapak Nanang selaku koordinator Paguyuban Jasa Parkir dan Dinas Perhubungan dengan Bapak Harry Dwi Yunianto, SPsi, MM selaku kepala seksi perencanaan dan Tata kelola Perparkiran.

⁶³Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kulaitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 191.

2. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁶⁴ Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang klausula baku dalam layanan jasa Parkir ditinjau dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Akad Syariah dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan Klausula Baku dalam layanan Jasa Parkir.

3. Metode Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif, karena keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data *kredibilitas* (kepercayaan) kualitatif dapat dipercayai. Peneliti dalam teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan *Trianggulasi* yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pemanding terhadap data itu. Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.

⁶⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008) , h. 57.

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data harus sesuai dengan kebasahan data.⁶⁵ Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁶⁶ Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. Edit (*Editing*)

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu Klausula Baku dalam Layanan Jasa Parkir Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Akad Syariah.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi (*Verifikasi*)

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah

⁶⁵Andi Prastowo, *Penelitian Kualitatif dalam Persepektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 236.

⁶⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah.*, h. 48.

valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.⁶⁷ Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran dan untuk menjamin valid data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasikan dengan cara *trianggulasi* yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proposional.

4. Analisa Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-memilahnya

⁶⁷Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya:2002), h. 104.

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁸

Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

⁶⁸Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed., Rev, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2010), h. 248.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Malang

1. Sejarah Dinas Perhubungan Kota Malang

Pada awalnya Dinas Perhubungan Kota Malang bernaung dalam Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Dinas Terminal tingkat propinsi. Seiring dengan penetapan otonomi daerah pada tahun 2000, Dinas Perhubungan Kota Malang mulai berdiri sendiri. Saat ini, kantor Dinas Perhubungan Kota Malang terletak di ruas Jalan Raden Intan No. 1 Malang. Letak kantor Dinas Perhubungan Kota Malang sangat strategis karena dekat terminal Arjosari sekaligus dapat melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan langsung terhadap operasional transportasi atau perhubungan darat yang terpusat di terminal tersebut. Karena itu Terminal Arjosari berperan sebagai pintu gerbang dan cermin wajah Kota Malang, karena bagaimanapun juga masyarakat yang masuk Kota Malang

yang menggunakan transportasi darat pasti awalnya akan melihat terlebih dahulu lingkungan Terminal Arjosari tersebut sebelum melihat keseluruhan wilayah Kota Malang lainnya.

2. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan mempunyai tugas dan fungsi yang didasarkan atas surat Keputusan Walikota Malang Nomor: 55 Tahun 2012 tentang Uraian tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang yakni:

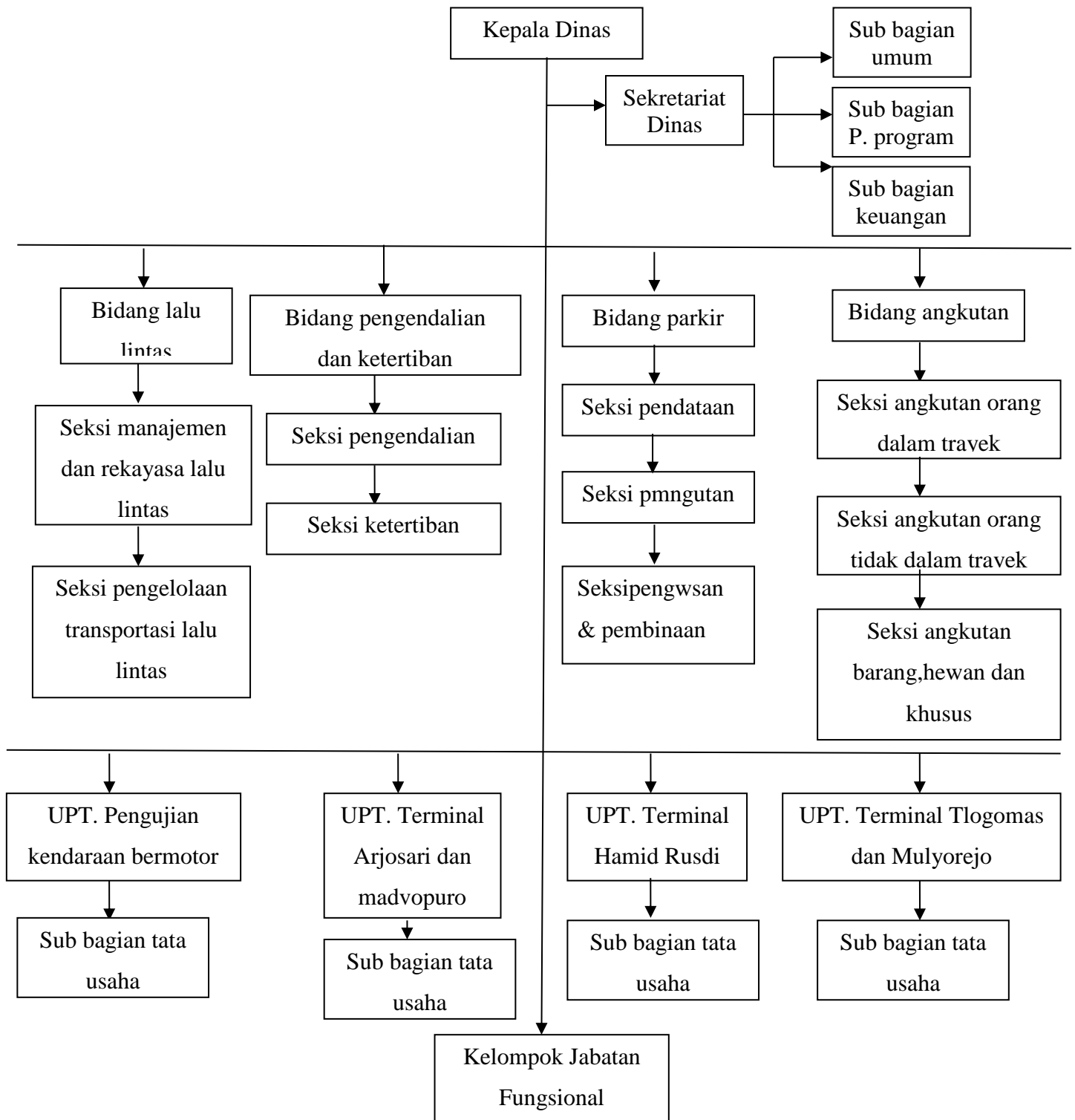
- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang Perhubungan.
- c. Penyusunan dan penetapan rencana teknis jaringan transportasi.
- d. Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- e. Pengoperasian dan pemeliharaan terminal.
- f. Pemantauan dan pengawasan transportasi jalan dan kebandar udara.
- g. Pelaksanaan pengendalian dan ketertiban lalu lintas.
- h. Pengembangan dan pengelolaan perparkiran.
- i. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
- j. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang perhubungan.
- k. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang perhubungan.
- l. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan retribusi.
- m. Penetapan jaringan transportasi jalan.
- n. Penyelenggaraan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas.

- o. Pemberian pertimbangan teknis perijinan dan pengawasan usaha di bidang perhubungan yang meliputi jasa angkutan, pos dan telekomunikasi.
- p. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perhubungan
- q. Pemberdayaan dan peningkatan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- r. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan.
- s. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- t. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Dalam rangka pengelolaan suatu lembaga agar dapat berjalan dengan baik dan lancar diperlukan suatu struktur organisasi yang tepat sesuai dengan besar kecilnya lembaga yang merupakan tempat bagi manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan agar dapat diketahui garis-garis tanggung jawab dan fungsi dari masing-masing bagian yang telah dibentuk.

Gambar 4.2 Struktur Organisasi



4. Visi Misi Dinas Perhubungan Kota Malang

Dinas Perhubungan Kota Malang memiliki visi terwujudnya system transportasi yang handal dan terintegritasi dan misi meningkatkan kualitas system dan transportasi aman tertib dan nyaman.

5. Sasaran Tujuan Dinas Perhubungan Kota Malang

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Malang maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya sarana dan prasarana Perhubungan;
- b. Bermanfaat keselamatan berlalu lintas;
- c. Terwujudnya pelayanan parkir yang tertib

B. Praktik Klausuka Baku “Kerusakan dan Kehilangan adalah Tanggung Jawab Pemilik Kendaraan” dalam Layanan Jasa Parkir di Kota Malang

Menurut Sultan Remy Sjahdeini dalam buku Hukum Perlindungan Konsumen mengartikan kontrak baku sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya dibakukan oleh pemakaiannya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapun yang belum dibakukan hanya beberapa hal saja, seperti jenis barang, warna, harga, waktu, tempat. Dengan kata lain yang dibakukan bukanlah formulir perjanjian tersebut melainkan klausula-klausulanya.⁶⁹ Adapun Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan klausula baku adalah suatu aturan atau ketentuan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pelaku

⁶⁹Shidarta, *Hukum perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT. Grasindo. 2006) h. 146

usaha secara sepihak yang kemudian dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau jasa perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁷⁰

Berdasarkan pengamatan yang dilaksanakan di Kota Malang yang memiliki potensi jumlah titik parkir pada Tahun 2016; \pm 615 titik, dan target perparkiran tahun 2016 adalah 7 Miliyar. Khususnya Parkir di area-area besar seperti Matos, MOG, Pasar Besar, alun-alun, dan Cyber Mall, telah menerapkan klausula baku yang dituangkan dalam bentuk karcis, adapun penerapan karcis beserta isinya tersebut dibedakan menjadi dua, pertama; karcis tersebut dibuat oleh lembaga pemerintah (Dishub), kedua, karcis beserta isinya tersebut dibuat oleh Pelaku usaha (*Koordinator Parkir*), adapun ciri-ciri karcis yang diterapkan oleh Pemerintah adalah; memiliki bentuk yang lebih kecil dan isi atau ketentuannya singkat, seperti *“berlaku untuk sekali parkir dan tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang bawaan”* dan dalam karcis tersebut dicantumkan logo dari Lembaga Pemerintah itu sendiri. Penentuan isi karcis itu dibuat oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh kepala perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang sebagai berikut:

“isi dalam karcis itu dibuat oleh pemerintah atau badan-badan hukum agar terdapat kesamaan visi dan misi, dan sebelum isi karcis tersebut itu ditetapkan atau diterbitkan sebelumnya telah dilakukan beberapa survey oleh UNBRA dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat, dari hasil penelitian tersebut disampaikan ke eksekutif dan kemudian disampaikan kelegislatif terkait dengan tarif, ketentuan isi karcis dan logo beserta lainnya”⁷¹

⁷⁰Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 angka 10.

⁷¹Hary Dwi Yunianto, wawancara (Malang, 18 mei 2017)

Sedangkan ciri-ciri isi atau ketentuan dari Koordinator Parkir adalah, memiliki ukuran kertas lebih besar dan font penulisannya kecil; dan ketentuannya lebih banyak dan terperinci, tidak ada logo khusus yang di pakai dalam karcis parkir, adapun isinya sebagai berikut ;

Karcis A:

1. Tarip parkir tercantum pada rambu parkir
2. Apabila karcis parkir ini hilang petugas berwenang memeriksa STNK dan akan dikenakan denda;
3. Jangan meninggalkan barang-barang berharga di dalam kendaraan anda, apabila ada barang-barang wajib ditiptkan;
4. Kerusakan dan kehilangan adalah tanggung jawab pemilik kendaraan.⁷²

Karcis B:

1. Tarif Parkir tercantum pada rambu tarif dan pemilik kendaraan harap mentaati peraturan yang berlaku;
2. Jika karcis tanda parkir ini hilang, maka pemilik kendaraan wajib memperlihatkan STNK dan Identitas pengendara. Serta keterangan resmi lainnya, dan pemilik kendaraan dikenakan biaya administratif sebesar Rp. 10.000; (Untuk Motor) dan Rp 20.000 (untuk Mobil)
3. Jangan meninggalkan barang-barang berharga dan karcis tanda parkir ini di dalam kendaraan anda;
4. Segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya merupakan tanggung jawab pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada pengganti berupa apapun dari penyedia jasa parkir).

⁷²Karcis Parkir samping matos Malang

5. Apabila ada keluhan atau saran, silahkan hubungi Customer Service EZ parking di telepon (021) 66604809-11.⁷³

Berdasarkan penjelasan dan ketentuan-ketentuan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa perjanjian baku merupakan suatu perjanjian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak yang memiliki kedudukan kuat dalam bertransaksi (pelaku usaha) yang dituangkan dalam bentuk karcis atau formulir yang diwajibkan kepada konsumen. Pihak pengelola parkir khususnya yang memiliki ketentuan isi karcis sendiri, selain memiliki peran sebagai pelaku usaha dia juga sebagai penanggung jawab dari adanya ketentuan yang mereka buat. Pada dasarnya lembaga pemerintah telah mewajibkan karcis yang dibuatnya digunakan serta diwajibkan untuk diberikan kepada konsumen, namun kenyataannya ada beberapa pelaku usaha yang tidak menyetujui hal itu dan pada akhirnya menerbitkan ketentuan dan isi dalam karcis itu sendiri. Seperti yang telah dikemukakan oleh bapak Dwi selaku kepala Bidang Perparkiran;

“karcis parkir itu bersifat wajib hukumnya dimiliki oleh pihak pengelola parkir, karena memang karcis tersebut termasuk fasilitas dari Lembaga Pemerintah selain rompi, jas hujan, karcis juga kami buat, supaya Lembaga Pemerintah memiliki nilai bagi masyarakat dan membuktikan bahwa Pemerintah lebih mengedepankan keselamatan dan keamanan untuk masyarakat atau konsumen.”⁷⁴

Adapun alasan yang disampaikan oleh Bapak Nanang selaku Pihak koordinator Parkir atau bisa disebut PPAKOMA (Paguyuban Parkir Kota Malang), menjelaskan bahwa:

⁷³Karcis parkir belakang Cyber Mall Dieng Malang

⁷⁴Hary Dwi Yunianto, wawancara (Malang, 17 April 2017)

“keberadaan Layanan Jasa Perparkiran ini memang harus didaftarkan ke Dinas Perhubungan kemudian setelah itu baru mendapatkan izin resmi untuk mengadakan bisnis layanan jasa parkir tersebut, kemudian dari pihak dinas perhubungan telah menyediakan beberapa atribut khusus misalnya jas hujan, rompi, peluit, serta karcis itu. Namun dalam hal ini kami tidak mengambil karcis tersebut karena jika mengambil karcis tersebut bisa dikenakan biaya cas 30% dari pendapatan, diluar setoran khusus yang wajib di berikan kepada Dishub setiap harinya, oleh karena itu Pihak pengelola parkir tidak mengambil karcis dari Dishub karena semakin banyak karcis yang dibutuhkan maka juga semakin banyak biaya yang dikeluarkan”.⁷⁵

Seperti halnya di area samping Mall Matos Malang, di area parkir tersebut ada 80 jukir dan 2 koordinator Parkir adapun Omset yang dicapai per hari bisa mencapai minimal RP. 2.000.000; dan Maksimal 5.000.000; tergantung Ramainya konsumen. Dengan hal itu pengelola parkir mensiasati bagaimana supaya gaji yang dicapai sesuai dengan kerja para jukir tersebut, karena selain biaya karcis ada juga biaya sewa lahan, biaya resiko (penggantian barang), dan setoran wajib ke Dinas Perhubungan, oleh karena itulah pihak pengelola parkir menerapkan karcis itu secara mandiri.

Jadi berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Koordinator Parkir membuat karcis secara mandiri dikarenakan ingin mengantisipasi biaya, juga dapat memberikan upah yang lebih besar kepada para jukir, Namun hal ini perlu ditekankan bahwa keberadaan Klausula yang ditetapkan oleh Koordinator parkir tidak beragam dengan klausula yang dibuat oleh Pihak Dishub. Sehingga hal ini akan menimbulkan perbedaan mengenai pertanggung jawaban yang akan di tanggung oleh Pelaku usaha itu sendiri.

⁷⁵Nanang, wawancara (Malang, 18 mei 2017)

Sesuai dengan perkembangan masyarakat, ciri-ciri kontrak baku mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan masyarakat. Klausula-klausula yang berat sebelah dalam kontrak baku tersebut biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁷⁶

Menurut Munir Fuady, kontrak baku memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya:

- a. *Dicetak dengan huruf kecil-kecil*; dalam penerapan isi atau ketentuan karcis biasanya memiliki 4-5 ketentuan yang dicantumkan dalam dokumen karcis tersebut, oleh karenanya bentuk tulisan beserta hurufnya berukuran kecil sehingga konsumen tidak menarik untuk membaca ketentuan tersebut.
- b. *Bahasa yang tidak jelas artinya*: isi/ketentuan yang diterapkan dalam karcis parkir harusnya memiliki bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh konsumen sehingga tidak adanya rasa kesalahpahaman terkait dengan ketentuan tersebut, dalam penerapan karcis yang berbunyi” kerusakan dan kehilangan adalah tanggung jawab pemilik kendaraan” merupakan klausula yang tidak jelas artinya, jika diartikan secara langsung ketentuan tersebut dapat merugikan konsumen, padahal dalam kenyataannya ketentuan tersebut dibuat agar konsumen tetap berhati-hati dalam menjaga barang miliknya sendiri dan tidak terlalu membebankan kepada pihak pengelola parkir terkait dengan pengawasan.
- c. *Tulisan yang kurang jelas dan susah dibaca*: dalam penerapan karcis ini klausula yang diterapkan sudah jelas dan mudah dibaca.

⁷⁶Munir fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* h.78

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan karcis yang dilaksanakan oleh Pengelola Parkir khususnya di Kota Malang merupakan kontrak baku yang sudah dibakukan oleh pembuat karcis itu sendiri, dalam hal ini konsumen tidak memiliki peran dalam pembuatan karcis tersebut mengenai bentuk maupun substansinya. Oleh Karena itu kontrak baku pada dasarnya dibuat oleh pengelola parkir dan sifat dari karcis itu harus dipenuhi oleh konsumen. Mengenai klausula baku yang menyatakan “kerusakan dan kehilangan adalah tanggung jawab pemilik kendaraan” merupakan sebuah ketentuan yang harus dipenuhi oleh konsumen karena ketentuan tersebut sudah menjadi ketetapan bagi pelaku usaha/pengelola parkir itu sendiri, oleh karena itu mengenai ketentuan tersebut hal ini sangat berkaitan dengan bentuk pertanggung jawaban dari pengelola parkir itu sendiri, karena jika melihat dalam praktiknya menerima karcis tersebut transaksi sudah bisa dikatakan sah tanpa ada negosiasi mengenai klausula tersebut, maka yang menjadi urgent dalam hal ini adalah perumusan dari ketentuan karcis itu sendiri yang mana pengelola parkir atau pelaku usaha tidak mencantumkan klausula baku yang bersifat eksonerasi atau pengalihan tanggung jawab, sehingga ada persamaan hak dan kewajiban dan konsumen tidak dirugikan.

Menurut Habib Nazar pada dan Muhammad Hasan pada hakekatnya pencantuman klausula baku dalam kontrak baku tidak lain adalah adanya pembagian beban resiko yang sesuai, meskipun dalam prakteknya makna klausula baku sering disalahgunakan oleh pelaku usaha yang tidak hanya untuk membebaskan dari beban tanggung jawab secara berlebihan, tetapi juga sampai pada penghapusan tanggung jawab. Dalam hal ini pihak yang menentukan syarat-

syarat atau isi perjanjian biasanya pelaku usaha yang memiliki kedudukan ekonomi yang kuat atau tinggi, sedangkan pihak konsumen memiliki kedudukan ekonomi lemah dan tingkat pengetahuan yang rendah. Dan karena didorong oleh kebutuhan, konsumen mau saja menerima syarat-syarat yang diberikan oleh pelaku usaha.⁷⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang terjadi di lapangan terkait dengan Penerapan karcis pada layanan jasa parkir yang berbunyi” kerusakan dan kehilangan adalah tanggung jawab pemilik kendaraan” merupakan ketentuan yang telah ditetapkan atau dibakukan oleh pengelola parkir, walaupun pada dasarnya ketentuan itu bersifat tidak adil dan merugikan kedudukan konsumen, Namun dalam hal ini sesuai dengan paparan yang telah di sampaikan oleh koordinator parkir terkait dengan klausula tersebut yaitu:

“bahwa sebenarnya penerapan dari isi karcis itu tidak bersifat tetap artinya ketentuan itu hanya sebagai peraturan yang tertulis saja, namun pada praktiknya kami (Segenap Koordinator Parkir) menjalankan kewajiban dan Tugas kami sebagaimana mestinya, dan mengenai poin ke 4 yang menyatakan “ kehilangan dan kerusakan adalah tanggung jawab pemilik kendaraan” hal ini merupakan peringatan saja kepada konsumen agar tetap menjaga barang yang dibawanya, dan seharusnya konsumen sudah lebih cerdas bahwa kami pihak pengelola parkir tidak akan seterusnya menjaga barang yang dimiliki oleh satu konsumen saja melainkan banyak konsumen, jadi alangkah lebih baiknya jika barang-barang itu ditiptkan ke penitipan barang yang telah disediakan.”⁷⁸

Adapun argumen yang disampaikan oleh Kepala Pihak Bidang Perparkiran DISHUB mengenai penerapan karcis yang berbunyi “*kerusakan dan kehilangan adalah tanggung jawab pemilik kendaraan*”, adalah sebagai berikut:

⁷⁷Habib Nazir dan Muh. Hasan, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Bandung: Kaki langit , 2004) h. 246

⁷⁸Nanang, wawancara (Malang, 18 mei 2017)

“pengelola parkir memiliki kewajiban yang mutlak dalam kerusakan maupun kehilangan barang konsumen, karena hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2009 , dengan menunjukkan STNK dan BPKB maka proses penggantian akan dilaksanakan, adapun mengenai penerapan klasula “kerusakan dan kehilangan adalah tanggung jawab pemilik kendaraan” itu hanya peraturan yang tertulis saja, namun pada kenyataannya jika terjadi kehilangan ataupun kerusakan pihak pengelola parkir akan mengganti rugi.”⁷⁹

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam penerapan isi karcis yang berbunyi “*kerusakan dan kehilangan adalah tanggung jawab pemilik kendaraan*” ini merupakan pernyataan tidak memiliki ketetapan secara pasti, karena walaupun di karcis itu tertulis demikian, namun pada praktiknya, kewajiban tetap dilaksanakan oleh Pihak pengelola Parkir karena pada dasarnya pengelola parkir wajib mengganti jika terjadi masalah pada konsumen, namun dalam hal ini yang menjadi urgen dalam penerapan karcis itu sendiri mengenai perumusan dari karcis tersebut, karena ketentuan itu bersifat tertulis dan wajib dipenuhi oleh konsumen maka pengelola parkir tidak harus semenah-menah dalam merumuskan isi dalam karcis parkir tersebut. Oleh karenanya pelaku usaha juga harus mengedepankan kesamaan hak dan kewajiban kepada konsumen agar kedua belah pihak tidak saling dirugikan.

C. Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap “Kerusakan dan Kehilangan adalah Tanggung Jawab Pemilik Kendaraan” dalam Layanan Jasa Parkir di Kota Malang

Menurut Shidarta membedakan antara klausula baku dengan klausula eksonerasi yaitu dalam klausula baku, yang ditekankan adalah prosedur

⁷⁹Hary Dwi Yunianto, wawancara (Malang, 17 April 2017)

pembuatannya yang sepihak dan bukan mengenai substansinya, sedangkan dalam klausula eksonerasi, yang dipermasalahkan adalah menyangkut substansinya yaitu mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha.

Hakikatnya klausula baku telah banyak berlaku di masyarakat. Pemberlakuan klausula baku pada hakikatnya adalah bertujuan untuk memudahkan memberikan pelayanan kepada mitra bisnis yang akan menggunakan produknya (barang dan/jasa). Meskipun praktik pemberlakuan klausula baku (eksonerasi) tidak dapat dihindarkan, namun untuk menertibkan penggunaannya pemerintah telah memberikan batasan-batasan (larangan) agar tidak merugikan konsumen.⁸⁰

Melihat dari hasil wawancara di atas peneliti akan menganalisis dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18.⁸¹

- 1) pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila (a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
- 2) pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- 3) setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Pada pasal 18 ayat 1 di atas , menjelaskan bahwa larangan yang dimaksud adalah untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Bahwa ketentuan dari pasal tersebut,

⁸⁰Burhanuddin, *hukum perlindungan konsumen* h.25

⁸¹Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18.h.94

larangan dalam penggunaan klausula baku dikaitkan dengan 2 hal yaitu, mengenai isi atau materi dan bentuk penulisannya. Berdasarkan segi materi, klausula baku dilarang memuat ketentuan yang tidak adil, sehingga hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Apabila dari segi materi tersebut memenuhi syarat asas keadilan bagi kedua belah pihak maka diperbolehkan. Sedangkan dari segi penulisannya, klausula baku harus dijelaskan secara jelas sehingga dapat dipahami oleh konsumen.⁸²

Dalam karcis yang diterapkan oleh Cyber Mall dan Matos Malang menyatakan bahwa *"segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkiran dan barang-barang didalamnya merupakan tanggung jawab pemilik kendaraan itu sendiri"*. Penerapan isi tersebut merupakan pernyataan yang sulit dimengerti oleh konsumen oleh karenanya ketentuan ini tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Sehingga peneliti memperoleh argumen/pernyataan dari Koordinator Pengelola Parkir MATOS Malang, maksud dari diadakannya pernyataan tersebut adalah:

"pernyataan kerusakan dan kehilangan itu merupakan barang bawaan yang dibawa atau yang ditinggalkan oleh pengemudi/konsumen, misalnya yang ditinggal itu barang bawaan contohnya Hp, ataupun helm, dimana hal itu memang tanggung jawab konsumen sendiri karena Kami disini telah menyediakan tempat penitipan barang bawaan yang dikhususkan kepada konsumen. Tetapi sepeda motor tetap kami jaga dan jika terjadi kehilangan dan kerusakan itu merupakan tanggung jawab dari kami".⁸³

⁸²Burhanuddin S. *Pemikiran Hhukum perlindungan Konsumen dan sertifikasi* halal h. 27

⁸³Nanang, wawancara (Malang, 18 mei 2017)

Berdasarkan dan penjelasan dan pernyataan dari Narasumber tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelarangan yang dicantumkan dalam pasal 18 ayat 1 UUPK adalah peraturan yang bersifat mutlak, karena pelaku usaha menyampaikan atau menuangkan klausula tersebut secara tertulis dan tidak bisa dikatakan sah, karena pernyataan “*kerusakan dan kehilangan adalah tanggung jawab pemilik kendaraan*” masih memerlukan penjelasan yang luas dari pihak pengelola parkir karena tidak semua konsumen itu cerdas dan bisa menafsirkan pernyataan tersebut. Maka klausula tersebut masih bisa dikatakan mengandung klausula eksonerasi yaitu pengalihan tanggung jawab yang semestinya di tanggung oleh pengelola parkir bukan dibebankan kepada konsumen.

Terkait dengan penjelasan diatas bahwa dalam peletakan atau pembuatan klausula baku perjanjian harus didasari dengan itikad baik (*good faith*) dan kejujuran. Karena praktik itikad baik dan kejujuran yang dilakukan oleh pelaku usaha merupakan kunci keabsahan dari suatu klausula baku itu sendiri sehingga konsumen secara langsung telah terbebas dari penipuan atau kecurangan dari pelaku usaha.

Hal ini sesuai dengan pasal 7 UU No.8 Tahun 1999 tentang Tanggung Jawab dari Pelaku usaha, sebagai berikut:⁸⁴

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
Penerapan klausula baku khususnya dalam layanan Jasa Parkir harus mengedepankan kejujuran, kesetaraan dan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

⁸⁴Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 7 h.

Maksudnya klausula yang diterapkan harus jelas dan transparan, terkait klausula layanan jasa parkir harus diperjelas supaya konsumen juga dapat memahami dengan mudah.

- c. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau pergantian pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

Selanjutnya pada pasal 18 ayat (2) mengatakan, bahwa *"pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti"*.

Berdasarkan hasil survey yang didapatkan oleh peneliti, Dalam penulisan isi karcis yang terjadi di lapangan, huruf yang dipakai ada yang terlalu tebal dan kecil, penempatan penulisan itu ada yang berada di balik karcis seperti halnya di Cyber Mall Malang, ada yang ditutupi dengan Nopol (Nomor STNK) yang biasanya di tulis manual oleh Jukir seperti yang diterapkan di Matos Matos, MOG, Pasar Besar, dan Alun-alun. Terkait dengan hal itu, konsumen juga cenderung memiliki sifat ketidakperdulian terhadap hal itu, karena lazimnya konsumen sendiri terkadang jarang memperhatikan bahkan meremehkan isi dari karcis parkir tersebut, sehingga banyak pelaku usaha yang mengelabui konsumen dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat tidak seimbang. Maka disinilah peran Pelaku usaha yang wajib diketahui, pelaku usaha tidak harus mengambil kesempatan yang bisa mengelabui konsumen serta melanggar dari peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan paparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan karcis di Kota Malang khususnya yang dinaungi oleh Dinas Perhubungan Kota

Malang bahwa adanya perbedaan antara peraturan yang di jelaskan dalam pasal 18 ayat (2) tersebut dengan praktek yang terjadi di layanan Jasa Parkir Kota Malang.

Dalam pasal 18 ayat (3) menyatakan, bahwa *“setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”*.

Berdasarkan KUHP telah mengatur ukuran sahnya perjanjian dalam pasal 13220 yang telah ditentukan syarat subjektif, dan syarat objektif, yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan sebab (kausa) yang halal. Persyaratan mengenai subjek (kesepakatan dan kecakapan) dan syarat objek (hal tertentu, dan kausa yang halal). Perbedaan syarat kedua tersebut dikaitkan dengan masalah batal demi hukum dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian. Maksud dari perjanjian batal demi hukum yaitu perjanjian yang sejak awal pembuatan telah batal, hukum menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada. Kontrak yang dapat dibatalkan adalah sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

Sehubungan dengan hal itu dalam penjelasan sebelumnya telah dibahas bahwa klausula baku Layanan Jasa Parkir yang berbunyi *“kerusakan dan kehilangan adalah tanggung jawab pemilik kendaraan”*, maka pasal 18 ayat 3 yang telah disebutkan diatas, menyatakan bahwa ketentuan yang telah memenuhi pasal 18 ayat 1 dan 2 dinyatakan batal demi hukum, jadi klausula tersebut masih bisa berlaku namun keberadaan klausula itu tidak dibenarkan oleh kuasa hukum.

D. Tinjauan Akad Syariah terhadap klausula baku “Kerusakan dan Kehilangan adalah Tanggung Jawab Pemilik Kendaraan” dalam Layanan Jasa Parkir di Kota Malang

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan ijtihad yang diwujudkan oleh akad tersebut. Akad syariah mempunyai rukun yaitu adanya aqid (orang yang melakukan akad), ma'qud (benda-benda yang diakadkan), ma'qud alaih (tujuan mengadakan akad tersebut) dan shigat al'aqad (ijab dan qabul).

Adapun akad syariah itu memiliki beberapa asas yang dijadikan sebagai landasan atau dasar untuk membuat dan menjalankan kontrak dengan benar sesuai dengan syariat islam, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Asas Ar-Ridhaiyah (konsensualisme), asas ini menekankan adanya kesempatan bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya dalam mengadakan transaksi.
2. Asas Hururiyah (kebebasan berkontrak), islam memberikan kebebasan kepada para pihak dalam membuat suatu perjanjian, bentuk dan isi perjanjian tersebut oleh para pihak.
3. Asas sebab yang Halal, dalam suatu kontrak sah dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya.
4. Asas Taswiyah (kesetaraan), merupakan asas kesetaraan bagi pelaku usaha dan konsumen, karena diantara pelaku usaha dan konsumen adanya perilaku saling membutuhkan satu dengan yang lain.

Keterkaitan antara asas tersebut dengan perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dalam layanan jasa parkir khususnya yang di Kota Malang, klausula yang menyatakan *“kerusakan dan kehilangan adalah tanggung jawab pemilik kendaraan”* merupakan perjanjian atau kontrak yang sepihak yang dibuat oleh pengelola parkir itu sendiri. Klausula tersebut bertentangan dengan Asas

kesetaraan dan kausa yang Halal, yang mana klausula tersebut dibuat secara sepihak dan tidak adanya unsur keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha, karena klausula tersebut merupakan pernyataan pengalihan tanggung jawab yang seharusnya ditanggung oleh pengelola parkir bukan kepada pemilik kendaraan atau konsumen. Meskipun pada umumnya klausula tersebut tidak mengikat namun klausula sifatnya tertulis, maka kontrak tersebut tetap bisa dikatakan tidak sesuai dengan asas-asas kontrak syariat.

Jadi, penerapan klausula karcis parkir yang diberlakukan di Kota Malang khususnya di Cyber Mall, MATOS, MOG, Pasar besar, dan alun-alun tidak sesuai dengan asas-asas yang diberlakukan dalam perjanjian syariah, oleh karenanya pengelola parkir harus lebih pintar dalam merumuskan klausula karcis tersebut.

Ada beberapa macam akad syariah/perjanjian syariah yang digunakan dalam praktik muamalah, namun disini peneliti hanya memfokuskan kepada akad *Al-Wadiah* terkait dengan tanggung jawab pengelola parkir.

Menurut Madzhab Hanafi akad wadiah adalah pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik disampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun dengan secara tidak langsung.⁸⁵ adapun Menurut Hanafiyah rukun al-Wadiah ada satu, yaitu ijab dan qabul sedangkan lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun.

Berdasarkan penjelasan diatas, perjanjian/akad yang diterapkan dalam layanan jasa Parkir termasuk dalam Akad wadiah/titipan, karena jika di lihat dari praktiknya pengelola parkir/jukir bertugas untuk menjaga harta/barang konsumen

⁸⁵Wahbah zuhaili, fiqh islam (jakarta:Gema insani 2011) h. 556

(termasuk sepeda motor ,helm dan lainnya), jadi pengelola parkir adalah orang yang dititipkan (*muwadda'*) dan konsumen merupakan orang yang menitip (*muwaddi'*), dan jika konsumen (*muwaddi'*) telah menyerahkan barangnya kepada jukir (*muwadda'*) maka terjadilah Ijab dan Qabul diantara keduanya didasarkan ketentuan yang telah disepakati.

Pada dasarnya Al-wadiah merupakan amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, hal berdasarkan firman Allah SWT :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَلْيُوْذِبْ بَعْضُكُمْۙ اَمْنًاۙ مِّنۢ فَاِنۡ مَّقْبُوْضَةٌۭ فَرٰهَنْۙ كَاتِبًاۙ تَجِدُوْا وَاُولٰٓئِكَ سَفَرٌ عَلٰۤى كُنْتُمْۚ وَاِنْ لَّبِئْهُۤ اَثِمٌۭ فَاِنَّهٗۙ يَكْتُمُهَاۙ وَمِنۡ الشَّهَادَةِ تَكْتُمُوْاۙ وَلَا رِبَّهٗۙ وَاللّٰهُ وَلِيَّتْۭ اٰمَنَتُهُۥۙ وَاَوْثَمِنَ الَّذِيْ عَلِيْمٌۭ تَعْمَلُوْنَۙ بِمَاۙ وَاللّٰهُ

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.”(QS. Al-Baqarah:283)

Maksudnya adalah, orang yang menerima titipan (*muwadda'*) memiliki tugas menjaga dan memelihara barang yang dititipi oleh penitip (*muwaddi'*), tetapi orang yang menerima titipan tidak berhak menjamin ketika barang yang dititipi tersebut rusak atau hilang tanpa sengaja lalai dalam mengawasi titipan tersebut, tetapi jika barang yang dititipi tersebut hilang atau rusak karena kelalaian

dari orang yang ditiipi (*muwadda'*) maka berhak memberikan jaminan atas hilang atau rusaknya benda atau barang tersebut.

Ibnu taymiyah juga menjelaskan apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada atsar bahwa Umar ra. Pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik ra ketika barang titipannya yang ada pada Anas r.a dinyatakan hilang sedangkan harta Anas sendiri masih ada⁸⁶

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa penitip sepeda motor (konsumen) berhak menuntut jaminan atau kerugian yang dialaminya ketika barang atau sepeda motornya hilang/rusak atas keteledoran dari pengelola parkir, dan pihak pengelola parkir itu wajib mengganti biaya kerugian yang diderita oleh konsumen. Pada dasarnya konsumen memiliki beberapa hak diantaranya hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, hak untuk mendapatkan kenyamanan, keselamatan dan keadilan, dan pelaku usaha harus memenuhinya. Namun ketika salah satu dari hak itu tidak terpenuhi maka ada kesalahan terkait tanggung jawab yang di jalankan oleh pelaku usaha.

⁸⁶Hendi suhendi “*fiqh muamalah*”h. 185

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat hasil kesimpulan dan pembahasan diatas yang sudah dianalisis maka peneliti menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Tinjauan Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya di dalam Pasal 18 UUPK pada penerapan Klausula baku pada Layanan Jasa Parkir yang dituangkan dalam bentuk karcis yang berbunyi *“kehilangan dan kerusakan adalah tanggung jawab pemilik kendaraan”*, yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena dalam UUPK pasal 18 ayat 1 (a), 2, dan 3 telah dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan mengenai pengalihan tanggung jawab, namun pada kenyataannya koordinator parkir telah membuat klausula (ketentuan) yang tidak sesuai dengan UUPK tersebut. Maka hal ini, Adanya ketidak samaan antara teori dan praktik yang terjadi dilapangan.

2. Berdasarkan Tinjauan Akad Syariah penerapan klausula baku pada karcis layanan Jasa parkir tidak sesuai dengan asas-asas syariah yang berlaku, dimana perjanjian tersebut adalah perjanjian tertulis yang di buat oleh salah satu pihak, di dalam asas-asas akad syariah dijelaskan bahwa akad yang dijalankan dalam bertransaksi harus sesuai dengan syariat islam. Diantaranya; asas ar-Ridhaiyah, asas hururiyah, asas taswiyah, dan asas sebab yang halal.

B. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk jurusan Hukum Bisnis Syariah, mahasiswa mendalami terkait dengan Undang-Undang yang berlaku agar mahasiswanya bisa mensosialisasikan kepada masyarakat atau pelaku usaha yang kurang memahami hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha atau koordinator layanan Jasa Parkir seharusnya lebih cermat dalam merumuskan Klausula Baku yang dituangkan dalam bentuk karcis dengan berlandaskan itikad baik dan Undang-Undang yang telah diberlakukan.
3. Untuk akademisi seharusnya memberikan pengawasan khusus terkait dengan perumusan Klausula Baku dalam layanan Jasa Parkir agar tercipta keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ahmadi miru& sutarman yodo,*hukum perlindungan konsumen*,(jakarta: Pt.Grafindo Persada,2004.

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Amiruddin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2004

Barkatullah, Abdul Halim ,*Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran*. Banjarmasin: FH Unlam Press

Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah* ,Yogyakarta:BPFE, 2009.

Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*.Malang: UIN Press 2012.

Daeng naja, *Contrac Draftng* (Bandung;citra Aditya Bakti , 2006.

Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*,Pustaka Yustisia,Yogyakarta,2012.

Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan *Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir A-lQur'an* . Jakarta:Maret, 1971.

Dewi,Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Djamil Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Erlies Septiana Nurbani Salim HS dan, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis Nawawi dan Disertasi*,Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Fuady, Munir,*Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: PT.citra Aditya Bakti

Habib Nazir dan Muh. Hasan, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah*Bandung: Kaki langit , 2004.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* Jakarta;Kencana.2011

Irma Devita& Suswinarno, *Akad Syariah*, Bandung:PT mizan pustaka, 2011.

- Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor:Ghalia Indonesia,2012.
- J.satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*.Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,1993.
- Kitab Suci Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Al-Hidayah, 1998.
- Kristiyanti,Celina Tri Siwi *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakrta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed.,Rev, Jakarta:Remaja Rosda Karya, 2010
- Muhwan Hariri Wawan ,*Hukum Perikatan* .Jakarta : pustaka setia.2011
- Muslih, Ahmad wardi, *Fiqh Muamalat*.Jakarta:Amzah,2010.
- Naja H.R. Daeng,Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Banker Hand Book, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Badung:MandarMaju, 2008.
- Nasution,Bahder Johan., *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung:Mandar Maju, 2008.
- R.soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan*, Jakarta;sinar grafika, 2010.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*,
- Salim HS.*Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika,2010.
- Shidarta, *Hukum perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo. 2006.
- Soekanto, Soejono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1996.
- Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Interasa, Jakarta, 1990,
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*,Jakarta:Rajawali Pers,2014.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta:Sinar Grafika, 2008
- Yasyin, Sulchan, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia* , Surabaya: Amanah, 1997.

Zuhaili, Wahbah *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jakarta:Gema Insani:2011.

Internet:

<https://id.wikipedia.org/wiki/Parkir> di akses pada tanggal 10 mei 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelola_parkir di akses pada tanggal 10 mei 2017

Parkir”<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Parkir&action=edit>, diakses pada tanggal 24 januari 2016

Pedoman Karya Tulis Ilmiah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012

Rivai, andi Muh.Rahmat ,*Tanggung Jawab Parkir Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir.* , Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar,2016.

Saputra , bilal Endra, yang berjudul “*Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor dilokasi Tempat Parkir Pasar Muntiran*”Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Satuhu, rachamnto, *Kendala Dinas Perhubungan dalam Mengawasi dan Memberi Pembinaan Bagi Pengelola Parkir untuk Mencegah Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Karcis (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Malang)*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum,Malang 2013

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Wawancara:

Kepala Perparkiran Harry Dwi Yunianto

Koordinator Parkir Malang Nanang Setiawan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Klausula Baku Layanan Jasa Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Akad Syariah” (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang)

A. Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang

1. Siapakah nama Bapak/Ibu di Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang?
2. Jabatannya sebagai apa Bapak/Ibu di Dinas Perhubungan Kota Malang?
3. Sudah berapa lama bertugas Bapak/Ibu di Dinas Perhubungan Kota Malang?
4. Ada berapa tempat area perparkiran dan biasanya di tugas dimana saja? Dan tugasnya seperti apa?
5. Apakah pihak Dishub ikut serta dalam pembuatan karcis parkir tersebut? Kalau iya, bagaimana keterlibatannya dalam pembuatan karcis tersebut?
6. Bagaimana pandangan ketentuan mengenai isi dalam karcis parkir?
7. Apakah manfaat atau fungsi dari diadakannya karcis dalam parkir tersebut?
8. Dalam karcis tersebut merupakan perjanjian yang telah di buat oleh pelaku usaha dan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi oleh konsumen, lalu, perjanjian tersebut termasuk perjanjian apa? (sewa menyewa/titipan)
9. Bagaimana jika ada konsumen yang merasa dirugikan akibat adanya klausula tersebut?
10. Dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban pihak pelaku usaha dan Pihak Dishub? Apakah wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen itu?
11. Bagaimana bentuk hubungan kerjasama antara pelaku usaha dan Dishub? Kesepakatannya seperti apa?
12. Dan apakah setiap parkir yang ditangani oleh Dishub harus ada perjanjiannya dalam bentuk karcis?

13. Jika tidak, mengapa? dan dimana saja yang harus ada karcisnya itu?
14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana dengan keberadaannya Klausula dalam karcis tersebut? Lebih banyak kemasalhatanny apa kemudaratannya?
15. Dan apakah selama ini sudah pernah ada pengawasan khusus terkait dengan penerapan klausula tersebut?
16. Jika pernah ada, bagaimana tindakan Dishub terkait dengan pelaku usaha yang telah menyalahi aturan-aturan yang berlaku?
17. Apakah ada peraturan khusus terkait dengan pencantuman klausula dalam karcis tersebut?
18. Terkait dengan tarif yang ditentukan Dishub, apakah ada perbedaan penarikan tarif di setiap layanan jasa parkir?
19. Dan terkait dengan jukir parkir, yang merekrut menjadi jukir parkir itu siapa?
20. Dan peran jukir parkir dalam layanan jasa parkir tersebut seperti apa? Apakah dia juga ikut bertanggung jawab jika ada konsumen yang dirugikan?

B. Koordinator Parkir Kota Malang

1. Siapakah Nama Ibu/Bapak di Bidang Perparkiran Kota Malang?
2. Sebagai apakah Jabatan Ibu/Bapak di Bidang Perparkiran Kota Malang?
3. Sudah berapa lama menjabat sebagai tugas Tersebut?
4. Ada Berapa area/wilayah yang di jadikan tempat Perparkiran?
5. Bagaimana hubungan pelaku usaha layanan jasa parkir dengan pemilik usaha?
6. Apa hubungannya perparkiran dengan Dinas Perhubungan kota Malang?
7. Bagaimana peran dishub terhadap Perparkiran kota Malang?
8. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh Dishub, apakah karcis juga termasuk fasilitas yang wajib di berikan ke pada bidang Perparkiran?
9. Bagaimana perumusan isi/ketentuan Karcis tersebut?
10. Bagaimana dengan isi karcis yang berbunyi “kehilangan adalah tanggung jawab pemilik kendaraan” ?
11. Apakah ketentuan isi dari karcis parkir tersebut bersifat mengikat?

12. Bagaimana dengan Bentuk pertanggung Jawaban pengelola parkir?
13. Jika terjadi kehilangan dan kerusakan pada barang siapa saja yang wajib bertanggung jawab?

**UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

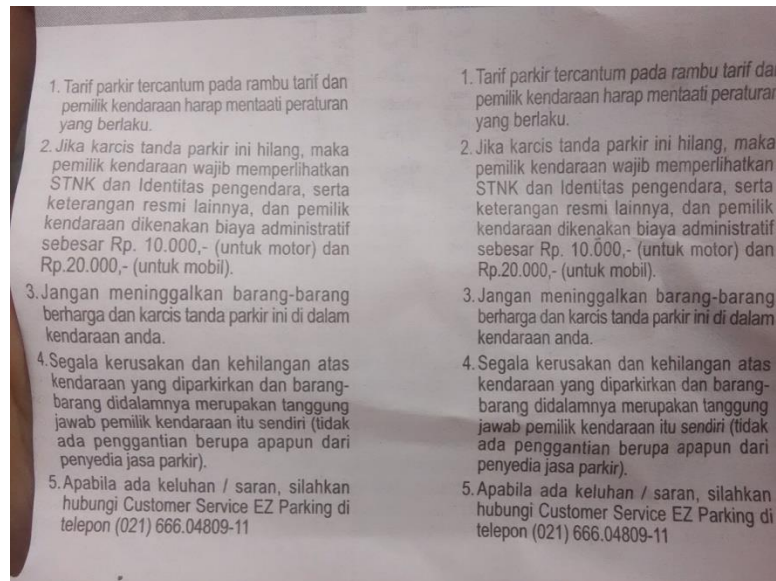
Ketentuan Pencantuman Klausula Baku

PASAL 18

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
 - b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
 - c) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - d) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - e) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - f) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;

- g) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum
- 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Karcis Parkir Cyber Mall Malang





PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raden Intan No.1 Telp.(0341) 491140
MALANG

Kode Pos : 65126

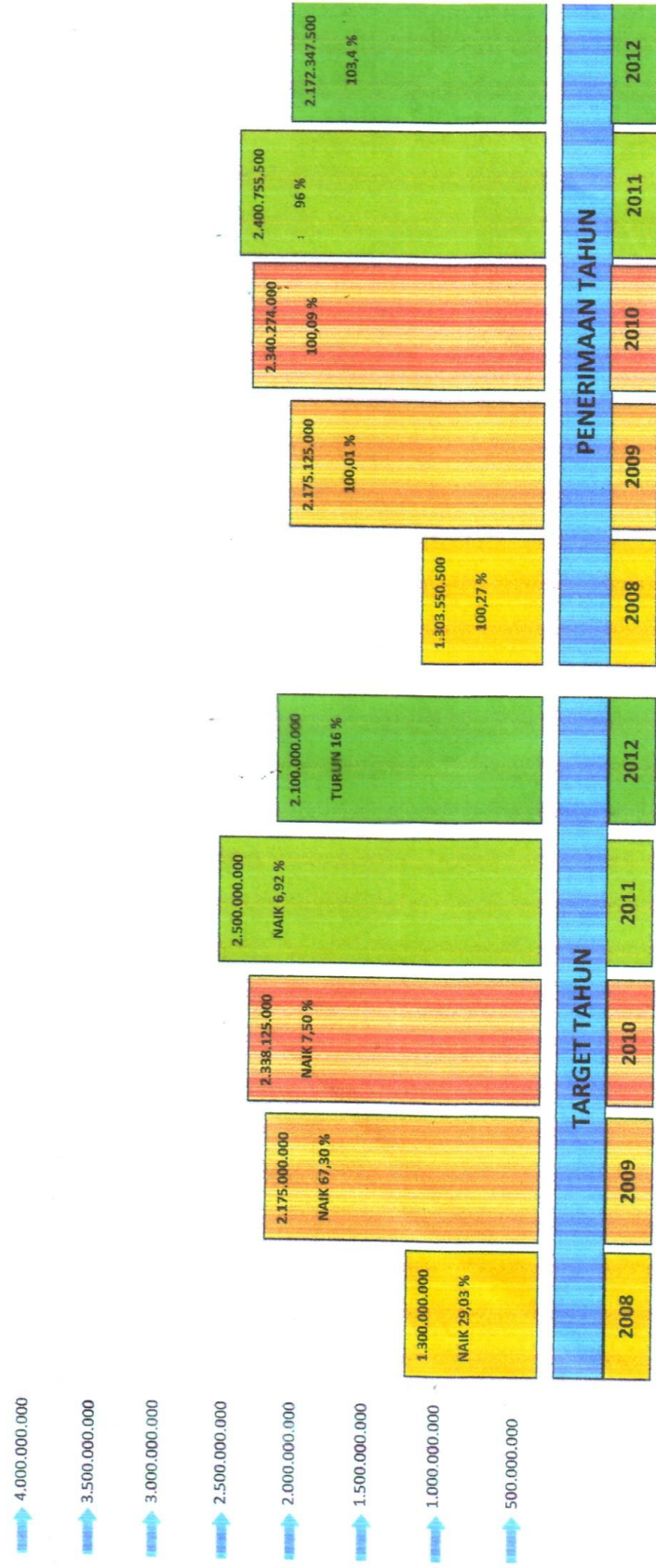
LAPORAN JAWABAN ATAS KUISI
MANAGEMENT PENGELOLAAN PERPARKIR
KOTA MALANG

1. Sudah tertuang di Profil Dinas Perhubungan Kota Malang
2. Landasan Hukum Proses Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Perparkiran Kota Malang yaitu
 - Peraturan Daerah Kota Malang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.
 - Peraturan Daerah Kota Malang Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Distribusi Jasa Umum
3. Kota Malang merupakan Kota Pendidikan, Kota Perdagangan dan pariwisata sehingga di kota Malang akan terjadi kegiatan ekonomi, adapun potensi Parkir yang adalah sbb:
 - Jumlah Titik parkir pada tahun 2016 : \pm 615 Titik
 - Jumlah titik baru sampai dengan bulan Februari : \pm 30 Titik
 - Target Perparkiran tahun 2016 : 7 Milyar
 - Target Perparkiran tahun 2017 : 7,5 Milyar
 - Sarana : lebar jalan, jumlah jalan panjang jalan memungkinkan ada kegiatan perparkiran
4. Pengaturan Perijinan Pengelolaan Perparkiran :
 - Tidak bertentangan dengan peraturan Lalulintas
 - Tidak mengganggu kepentingan umum
 - Ada ijin tidak keberatan dari pemilik yang di dukung oleh penguasa wilayah RT dan RW
5. Seleksi dan syarat untuk pengelolaan Perparkiran, Setelah di item 4 terlewati :
 - Mengajukan permohonan pengelolaan perparkiran kepada Dinas Perhubungan
 - Membuat Pernyataan mentaati ketentuan/peraturan yang di keluarkan pemerintah
 - Memberikan Foto Copy KK & KTP calon pengelola parkir
 - Materai 2 lembar
 - Foto beground merah 4 x 6 sejumlah 4 lb
 - Dilampiri Surat Ijin atau Surat Pernyataan Pemilik lokasi
 - Di tempat pada map warna Biru (bila perpanjangan Surat Penunjukan) SP, map Hijau bila Titik Baru
 - Selanjutnya akan dibuat SP (Surat Penunjukan) bila sudah dilakukan Survey lokasi
 - Dibuatkan Surat Perjanjian Jumlah Nominal untuk setoran kepada Pemerintah (DISHUB) yang akan diambil oleh petugas Dishub.
 - Kartu Tanda Anggota akan diberikan beserta Rompi dan Karcis Parkir
6. Pengawasan dilakukan setiap hari dan terus merespon keluhan masyarakat terhadap Jukir yang melakukan fungsinya tidak sesuai dengan ketentuan

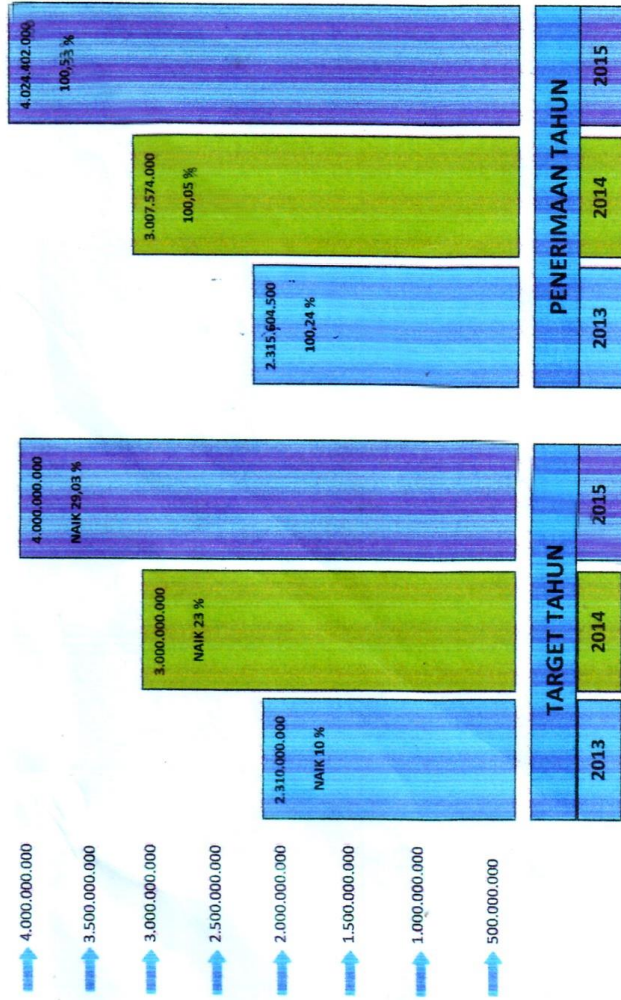
7. Dilakukan Pembinaan dalam bentuk sosialisasi kepada Koordinator Jukir tentang tata aturan dan kebijakan baru secara berkala tiap semester.
8. Surat Penunjukan (SP) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) berlaku 1 tahun per tanggal surat yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang.
9. Dinas Perhubungan hanya menangani Restribusi Parkir sedang pengelolaan Pajak Parkir dan tempat khusus di kelola oleh Dispenda
10. Telah diatur di Perda bahwa bila ada kesalahan atau kehilangan di karenakan keteledoran petugas Parkir maka akan di bebaskan kepada Koordinator Petugas Parkir (contoh : Helm atau sepeda Motor) dengan membawa Bukti Karcis Parkir dan Surat Kehilangan dari Kepolisian di lampiri STNK dan BPKB kendaraan yang hilang.
11. Perparkiran pada kegiatan Insidentil untuk petugas lebih di utamakan masyarakat lokasi kegiatan dan sifat pembagian hasil parkir sesuai dengan kesepakatan dan untuk petugas Parkir insidentil di bekali surat tugas yang dikeluarkan Dinas Perhubungan.
12. Memantau beberapa hari oleh Petugas Dishub potensi parkir yang ada di lokasi tersebut, selanjutnya menentukan target yang dituangkan pada Surat Pernyataan kesanggupan Jukir memenuhi setoran harian.
13. Sesuai Undang-undang dan Peraturan bahwa Jalan Pusat dan Propinsi tidak dilarang ada kegiatan perparkiran, tapi kenyataan lapangan ada kegiatan perparkiran maka peran Dinas Perhubungan untuk mengatur dan mengendalikan Managemen Perparkiran di lokasi tersebut.

Malang,
BIDANG MANAJEMEN PERPARKIRAN

PERBANDINGAN TARGET DAN PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TAHUN 2008 S/D 2012



PERBANDINGAN TARGET DAN PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TAHUN 2013 S/D 2015





PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Raden Intan No. 1 Telp. (0341) 491140 Fax. 411626
MALANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072 / 1548 / 35.73.310 / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. MUJI RAHAYU**
NIP : 19621216 198503 2 002
Pangkat/ Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris
Unit Organisasi : Dinas Perhubungan Kota Malang

Menerangkan bahwa :

Nama : **SUMMIYATI**
N. I. M : 1220228
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. MT Haryono Gg. 8 No. 997 Malang

Yang bersangkutan telah mengadakan Penelitian / Survey / Research di Dinas Perhubungan Kota Malang pada tanggal 17 April 2017, dengan judul penelitian Analisis Klausula Baku Layanan Jasa Parkir dalam Perspektif Teori Keadilan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 5 September 2017

An. **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG**
SEKRETARIS



Dra. MUJI RAHAYU
Pembina Tingkat I
NIP. 19621216 199503 2 002



Wawancara dengan Bapak Harry Kepala Perparkiran DISHUB



Foto dengan Sekertaris DISHUB



Wawancara dengan Koordinator Parkir Kota Malang

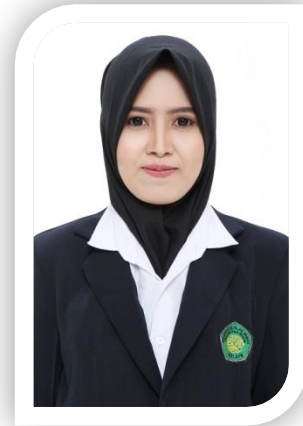


Bapak Nanang Koordinator parkir Kota Malang

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI

Nama : SUMMIYATI
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 15 Juni 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Angkatan Temor Lorong 001/001
Kec. Arjasa Kab. Sumenep
Telepon : 083827569198
Email : Summiyatiemi@gmail.com
Riwayat Pendidikan : TK Assyuhada' Laok Jang-Jang 1999-2001
SDN Angkatan 1 2001-2007
SMPN 2 Arjasa 2007-2010
SMAN 1 Arjasa 2010-2013



DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Muslimin
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 01 April 1965
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Nasya
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 10 Mei 1967
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Desa Angkatan Temor Lorong 001/001
Kec. Arjasa Kab. Sumenep